

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGANGGURAN
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

**NUR FITRIANA
NIM. 160604007**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nur Fitriana
NIM : 160604007
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Nur Fitriana

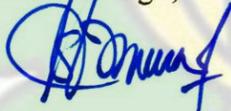
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan
Manusia, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Di Indonesia

Disusun Oleh:

Nur Fitriana
NIM. 160604007

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Suriani, SE., M.Si
NIP. 197505062006042001

Pembimbing II,



Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 19720428 199903 1005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Nur Fitriana
NIM. 160604007

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2022
8 Jumadil Akhir 1443 H

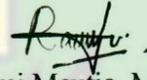
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Suriani, SE., M.Si
NIP. 197505062006042001

Sekretaris,



Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Penguji I



Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801

Penguji II

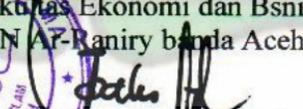


Safarul Afa, SE., M.Si
NIDN. 1318129701



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nur Fitriana

NIM : 160604007

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

E-mail : 160604007@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 14 November 2022

Mengetahui,

Penulis

Nur Fitriana

NIM. 160604007

Pembimbing I

Dr. Surtani, SE., M.Si

NIP. 197505062006042001

Pembimbing II

Rachmi Meutia, M.Sc

NIP. 198803192019032013

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia". Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Walau terkadang terdapat hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, karena kondisi daerah saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan proses bimbingan skripsi ini tidak bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka langsung dengan dosen pembimbing skripsi ini. Namun berkat kehendak dan kuasa Allah SWT tidak ada yang tidak mungkin didunia ini sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, S.E.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, S.E., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Suriani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah rela membagi waktunya untuk bimbingan online maupun tatap muka dengan kesabarannya yang telah memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Isthafan Najmi, S.E., M.Si selaku Penguji I dan Safarul Afa, S.E., M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
6. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si. Selaku penasehat Akademik (PA) penulis serta Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas

Islam Negri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.

7. Terima kasih kepada Dinas Lembaga Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan terkait penelitian.
8. Terima kasih kepada kedua Orang Tua dan saudara-saudara saya yang tercinta, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua Ayahnda Syeh Ramli (Alm) dan Ibunda Hamidah atas segala kasih sayang, didikan, pengorbanan, dorongan, kepercayaan, dukungan moral, material dan yang selalu mendoakan saya agar dimudahkan segala urusan oleh-Nya dalam mewujudkan impian dan menyelesaikan skripsi ini. Dan pula terima kasih juga kepada abang dan adik-adik saya sudah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
9. Terima kasih kepada Dewi Rama Yanti, Liza Afrida, Nurhalijah, Jufri, Nova Santi dan Nurul yang selalu membantu dan memberikan semangat agar skripsi sampai selesai di tepat pada waktunya.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu. Seluruh kebaikan yang telah kalian lakukan hanya Allah SWT yang dapat membalasnya.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walau bagaimana pun penulis berusaha memberikan yang terbaik dari ketidaksempurnaan yang ada. Demikian segala saran dan kritik yang tertuju pada penulisan ini, penulis terima dengan lapang dada dan ikhlas. Semoga Allah Swt. Dapat membalas segala kebaikan yang penulis terima, amin ya rabbal alaimin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 22 Desember 2021

Penulis,

Nur Fitriana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutoh* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *marbutoh* (ة) hidup

Ta *marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutoh* (ة) mati

Ta *marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutoh* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

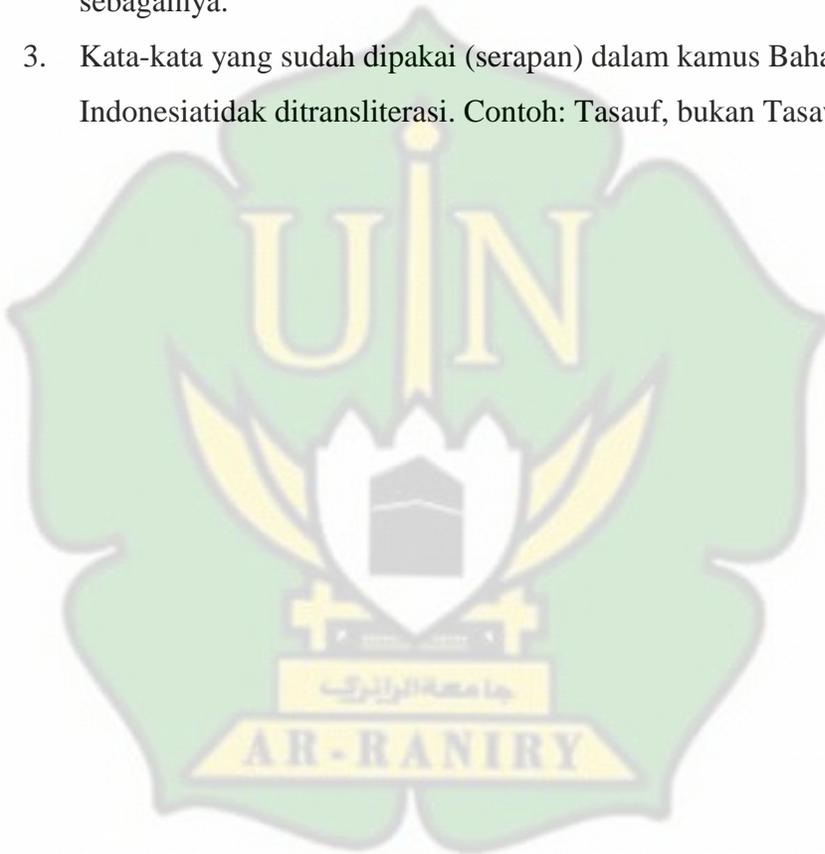
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Nur fitriana
NIM : 160604007
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia.
Tanggal Sidang : 10 Januari 2022
Tebal Skripsi : 82 Lembar
Pembimbing I : Dr. Suriani, SE., M.Si
Pembimbing II : Rachmi Meutia, M.Sc

Kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam menghasilkan pendapatan stabil untuk memenuhi hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan sebagai seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial secara bermartabat. Oleh karena itu pemerintah harus menanggulangi penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel menggunakan *fixed effect model* sebagai model yang terpilih. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upah minimum regional secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum regional dengan tingkat kemiskinan. Kemudian indeks pembangunan manusia secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan. Dan pengangguran secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Namun secara simultan diperoleh hasil bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

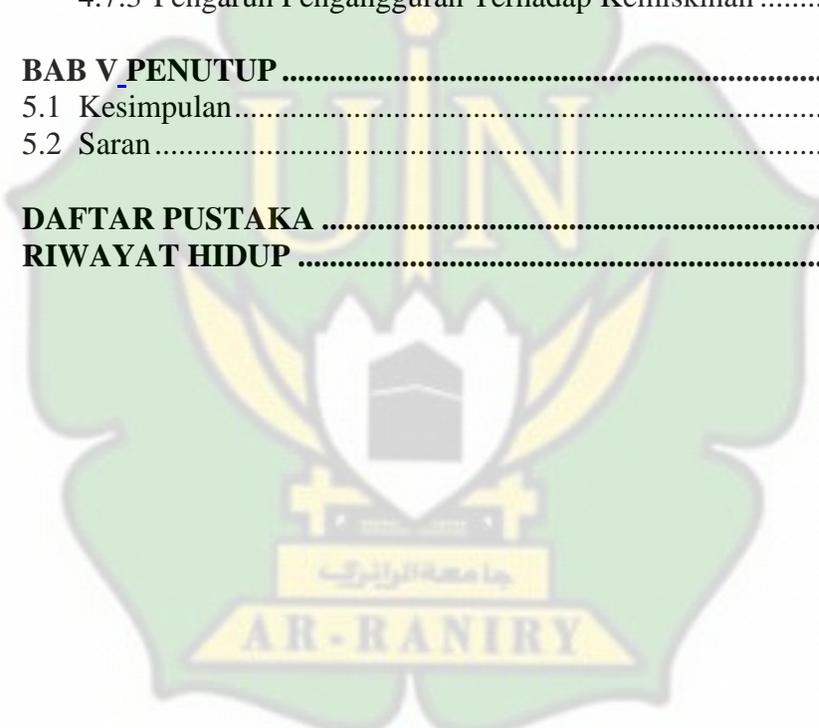
Kata Kunci: Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Kemiskinan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Kemiskinan.....	20
2.1.1 Penyebab Kemiskinan	22
2.1.2 Ukuran Kemiskinan.....	23
2.1.3 Indikator Kemiskinan	25
2.2 Upah Minimum Regional	26
2.3 Indek Pembangunan Manusia.....	35
2.4 Pengangguran	40
2.5 Penelitian Terkait.....	47
2.6 Kerangka Berpikir	52
2.7 Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	54
2.7.1 Hubungan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan	54
2.7.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan	55
2.7.3 Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan	55
2.8 Hipotesis	56

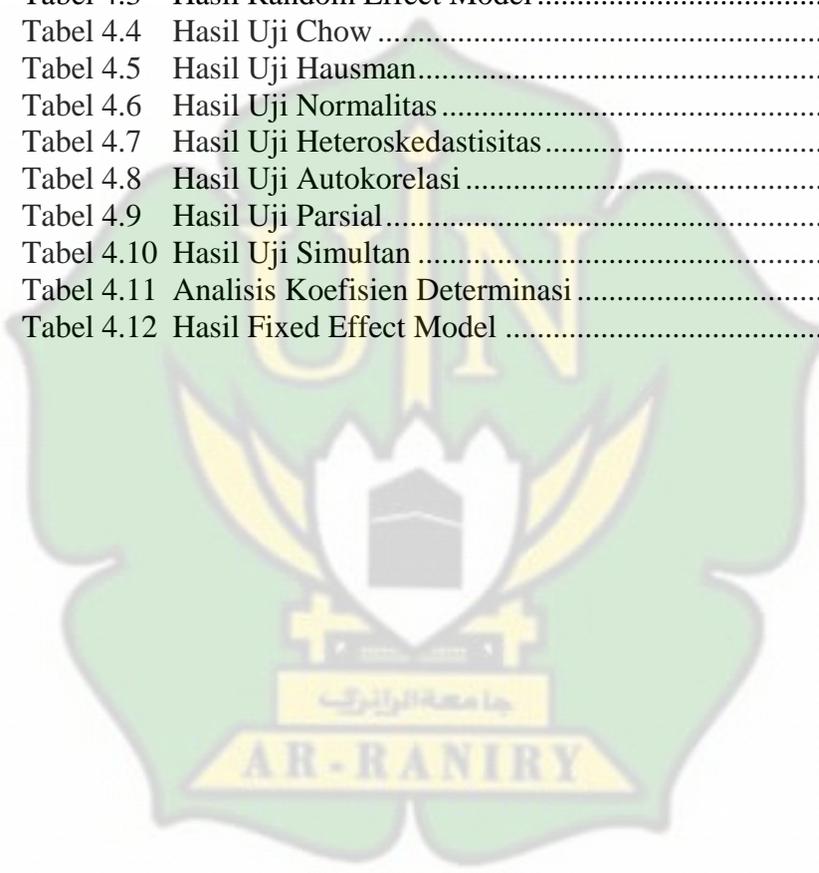
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Desain Penelitian.....	58
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	58
3.2 Populasi dan Sampel	59
3.2.1 Populasi.....	59
3.2.2 Sampel.....	59
3.3 Sumber Data	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data	61
3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	61
3.5.1 Variabel Dependen.....	61
3.5.2 Variabel Independen	62
3.6 Metode dan Teknik Analisis Data	63
3.6.1 Model Regresi Data Panel.....	64
3.6.2 Uji Goodness of Fit.....	67
3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik	69
3.7 Pengujian Hipotesis	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
4.1.1 Peta Provinsi di Indonesia.....	73
4.2 Analisis Deskriptif.....	74
4.2.1 Kemiskinan	74
4.2.2 Upah Minimum Regional.....	75
4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	77
4.2.4 Pengangguran.....	78
4.3 Estimasi Regresi Data Panel.....	80
4.3.1 Hasil Common Effect Model	80
4.3.2 Hasil Fixed Effect Model	80
4.3.3 Hasil Random Effect Model	81
4.4 Hasil Uji Goodness of Fit.....	81
4.4.1 Hasil Uji Chow.....	82
4.4.2 Hasil Uji Hausman	83
4.5 Pengujian Asumsi Klasik	83
4.5.1 Uji Normalitas.....	84
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	85
4.5.3 Uji Autokorelasi.....	85
4.6 Pengujian Hipotesis	86

4.6.1 Uji Parsial.....	86
4.6.2 Uji Simultan	87
4.6.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	88
4.6.4 Analisis Regresi Data Panel.....	89
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	90
4.7.1 Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan	91
4.7.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan	92
4.7.3 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan	93
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
RIWAYAT HIDUP	117



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	50
Tabel 4.1	Hasil Common Effect Model.....	80
Tabel 4.2	Hasil Fixed Effect Model	81
Tabel 4.3	Hasil Random Effect Model	81
Tabel 4.4	Hasil Uji Chow	82
Tabel 4.5	Hasil Uji Hausman.....	83
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas	84
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas	85
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi	86
Tabel 4.9	Hasil Uji Parsial.....	86
Tabel 4.10	Hasil Uji Simultan	87
Tabel 4.11	Analisis Koefisien Determinasi	88
Tabel 4.12	Hasil Fixed Effect Model	91



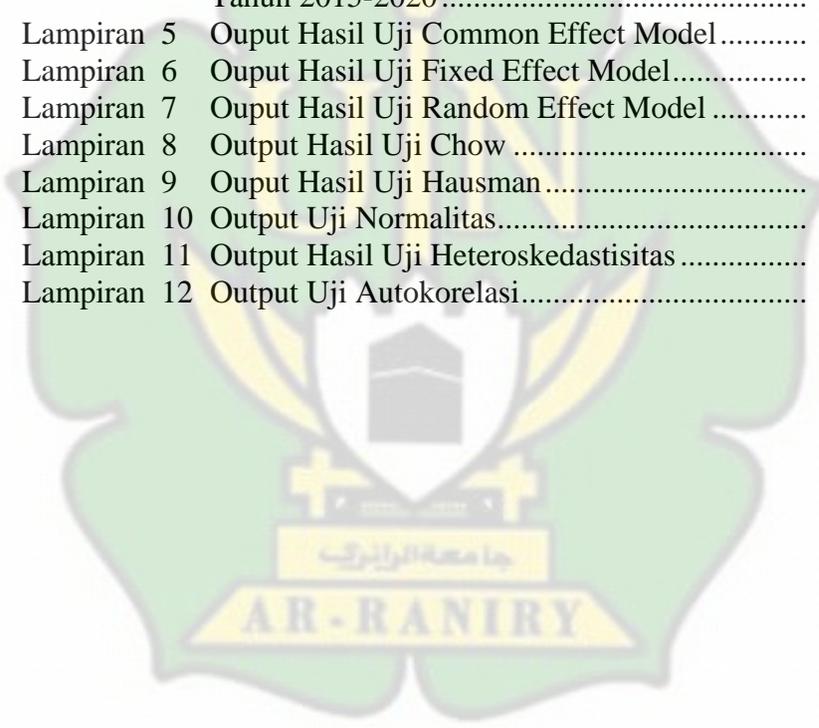
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020	3
Gambar 1.2	Upah Minimum Regional Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020.....	7
Gambar 1.4	Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2020.....	13
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	53
Gambar 4.1	Peta Provinsi di Indonesia.....	73
Gambar 4.2	Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020	74
Gambar 4.3	Data Tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2015-2020.....	76
Gambar 4.4	Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015-2020	77
Gambar 4.5	Persentase Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2015-2020	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020	101
Lampiran 2	Tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2015-2020	103
Lampiran 3	Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2020	105
Lampiran 4	Persentase Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2015-2020	107
Lampiran 5	Ouput Hasil Uji Common Effect Model	109
Lampiran 6	Ouput Hasil Uji Fixed Effect Model	110
Lampiran 7	Ouput Hasil Uji Random Effect Model	111
Lampiran 8	Output Hasil Uji Chow	112
Lampiran 9	Ouput Hasil Uji Hausman	113
Lampiran 10	Output Uji Normalitas	114
Lampiran 11	Output Hasil Uji Heteroskedastisitas	115
Lampiran 12	Output Uji Autokorelasi	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara yang sedang berkembang di seluruh dunia. Kemiskinan itu bukan ketidakmampuan ekonomi semata, akan tetapi kemiskinan juga mengenai kegagalan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta perbedaan perlakuan terhadap seseorang didalam kehidupannya. Kemiskinan adalah masalah yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material dan non material. Kemiskinan menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial di dalam kehidupan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dalam suatu negara atau daerah terutama di Indonesia (Sukmaraga, 2011).

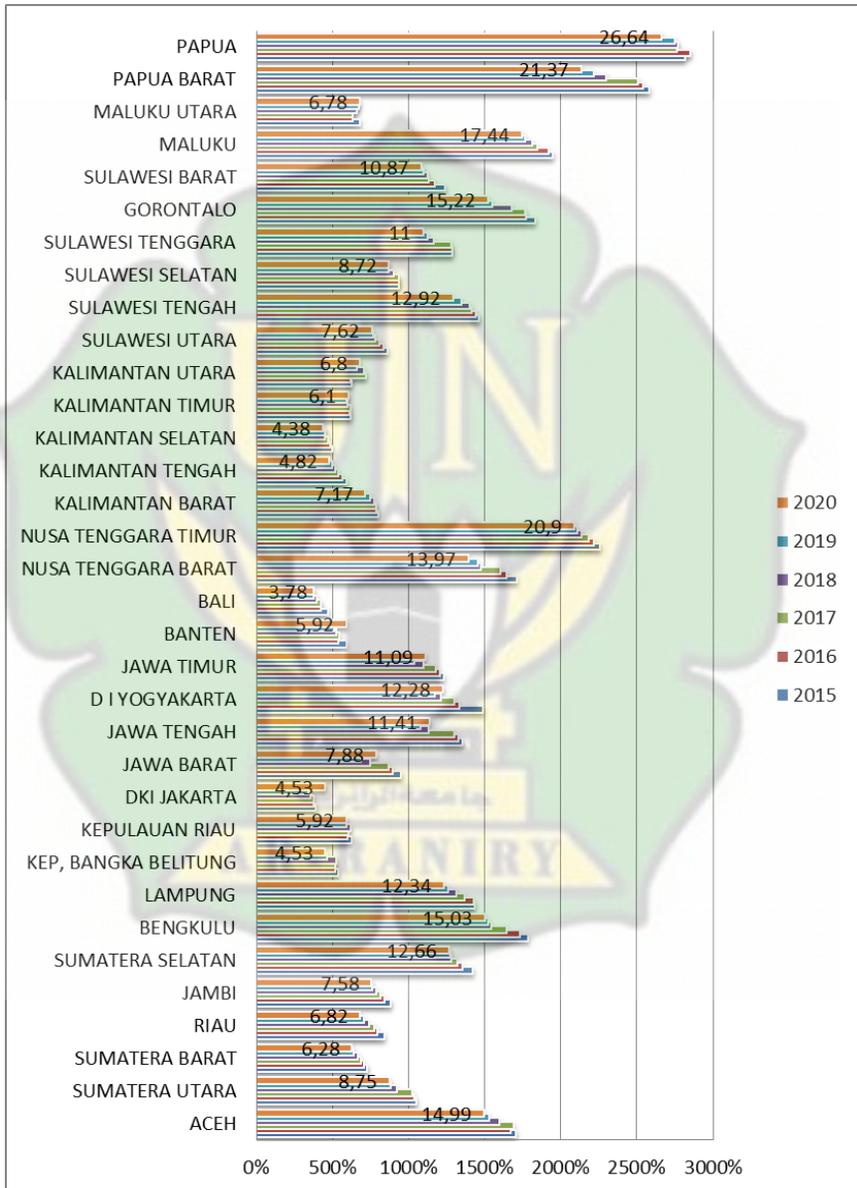
Kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam menghasilkan pendapatan stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun sekelompok orang didalam menjalankan kehidupan sosial secara sempurna (Wulandari, 2019). Kebutuhan hidup untuk mendapat pengakuan secara umum merupakan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pangan, sumber daya alam, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan kesehatan, lingkungan hidup, kebutuhan rumah tangga, air bersih, rasa aman, serta perlakuan atau, hak untuk serta berpartisipasi

dalam kehidupan sosial politik, ataupun ancaman tindak kekerasan (Farathika, 2020).

Kemiskinan yang tinggi akan menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemiskinan menjadi suatu hal serius yang harus ditangani oleh pemerintah karena kemiskinan dalam suatu negara menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal dalam negara dan daerah tersebut. Kemiskinan banyak menyebabkan dampak negatif seperti masalah sosial, kemiskinan juga mempengaruhi pembangunan di suatu daerah atau negara (Novianto, 2018).

Indonesia adalah suatu negara yang masih terus berjuang agar dapat keluar dari zona kemiskinan. Walaupun Indonesia tidak termasuk kedalam daftar negara termiskin di dunia namun tingkat kemiskinan Indonesia masih naik turun setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah belum terealisasikan untuk memberantaskan masalah yang satu ini. Berikut gambar jumlah tingkat penduduk miskin di Indonesia tahun 2015-2020.

**Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2015-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Berdasarkan Gambar 1.1 persentase tingkat kemiskinan yang paling tinggi dari tahun 2015-2020 diduduki oleh Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,64% pada tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua lebih tinggi dari tahun setelahnya yaitu sebesar 28,54%, dan terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2019 kembali meningkat sebesar 27,53% sebelum akhirnya turun kembali di tahun 2020. Namun walaupun tingkat kemiskinan di Papua naik turun setiap tahunnya, Papua tetap menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi daripada Provinsi lain di Indonesia. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi kedua setelah Papua pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,37%. Jumlah ini termasuk rendah daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Provinsi Papua Barat mengalami puncak peningkatan kemiskinan sebesar 25,82% dan terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2020. Dan setelah itu disusul pada posisi ketiga Provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 22,61% pada tahun 2015 dan terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan di NTT menjadi 20,9%.

Persentase tingkat kemiskinan yang tinggi selanjutnya adalah Provinsi Maluku yaitu sebesar 17,44% pada tahun 2020. Peningkatan kemiskinan selanjutnya disusul oleh Provinsi lainnya yaitu Gorontalo, Bengkulu, Aceh dan seterusnya. Sementara tingkat kemiskinan paling rendah dari seluruh Provinsi di Indonesia

diduduki oleh Provinsi Bali yaitu sebesar 3,78% pada tahun 2020, dan diikuti oleh Provinsi lain yaitu Kalimantan Selatan sebesar 4,38%, DKI Jakarta sebesar 4,53%, Kep. Bangka Belitung sebesar 4,53% dan seterusnya diikuti oleh Provinsi lain di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

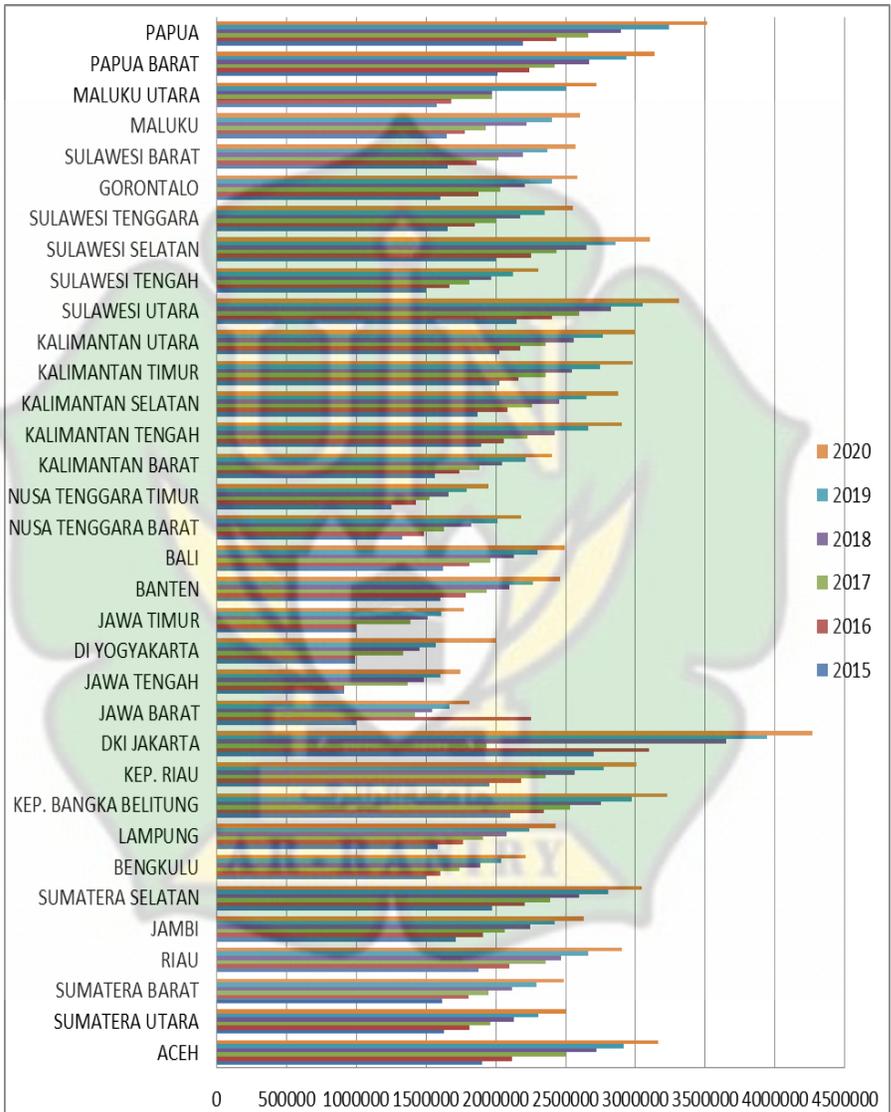
Penyebab kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ialah rendahnya upah bagi tenaga kerja (UMR). Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu indikator untuk mengatasi tingkat kemiskinan (Panjawa & Soebagiyo, 2014). Upah ini menjadi suatu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Upah adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada satu unit kerja berupa uang yang di bayarkan sebagai hasil dari usaha atau kerja oleh tenaga kerja. Upah bagi pekerja sangat penting karena itu merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya serta menjadi sumber pembelanjaan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah harus memperhatikan tingkat UMR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta harga barang dan jasa karena tinggi rendahnya upah akan menjadi faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik atau sebaliknya (Said, 2017).

Pemberian upah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menghindari masyarakat dari masalah sosial yang berhubungan dengan perekonomian seperti kemiskinan. Masyarakat dengan upah minimum regional yang rendah dalam suatu daerah atau wilayah memiliki standar hidup dengan tingkat

konsumsi yang rendah juga, dan sebaliknya jika upah minimum regional tinggi maka masyarakat daerah ataupun wilayah tersebut memiliki standar hidup serta tingkat konsumsi yang tinggi pula. Melalui pemberian Upah Minimum Regional akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat meminimalisir masalah kemiskinan. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Sukmaraga, 2011).

Dari Gambar 1.2 dibawah ini dapat dilihat bahwa upah minimum paling tinggi di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp4.267.349 pada tahun 2020. Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan upah pada tahun 2015 dan 2016, namun pada tahun 2017 upah minimum di DKI Jakarta sempat menurun drastis sebelum akhirnya kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya Provinsi dengan upah minimum tertinggi setelah DKI Jakarta yaitu Provinsi Papua. Pada tahun 2020 umr di Papua sebesar Rp3.516.700. Provinsi Papua selalu mengalami kenaikan umr setiap tahunnya. Pada posisi ketiga umr tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi Sulawesi Utara dengan umr sebesar Rp3.310.723. Provinsi ini juga mengalami kenaikan umr setiap tahunnya. Itulah tiga besar Provinsi dengan umr tertinggi di Indonesia yang selanjutnya disusul oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung, Aceh, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Provinsi-Provinsi lain seterusnya.

Gambar 1.2 Upah Minimum Regional Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Walaupun tingkat upah minimum di Indonesia sudah mengalami peningkatan di beberapa Provinsi, tetapi tetap ada beberapa Provinsi yang upah minimumnya masih tergolong rendah diantaranya ada Provinsi Jawa Tengah dengan umr sebesar Rp1.742.015 tahun 2020, Provinsi ini hanya mengalami kenaikan umr beberapa persen saja setiap tahunnya. Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi dengan tingkat umr paling rendah di Indonesia. Provinsi selanjutnya dengan umr paling rendah adalah Provinsi Jawa Timur dengan umr sebesar Rp1.768.777 serta Provinsi Jawa Barat dengan umr Rp1.810.350 masing-masing pada tahun 2020. Inilah Provinsi-Provinsi dengan tingkat umr paling rendah di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Rendahnya umr di suatu daerah memicu lahirnya angka kemiskinan yang akan sangat mempengaruhi tingkat pembangunan ekonomi suatu negara serta memiliki banyak dampak negatif seperti munculnya masalah-masalah sosial. Kemiskinan menyebabkan hambatan besar dalam pembangunan ekonomi sebuah negara karena masyarakat yang miskin memiliki daya beli yang rendah karena pendapatan penduduk perkapita yang dimiliki rendah sehingga pendapatan nasional negara menurun dan menyebabkan pengeluaran biaya yang besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Najmi, 2019). Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor-faktor diantaranya: Pengangguran, rendahnya sumber daya manusia (SDM) akibat rendahnya IPM, minimnya lapangan pekerjaan, kekurangan modal untuk membuka usaha

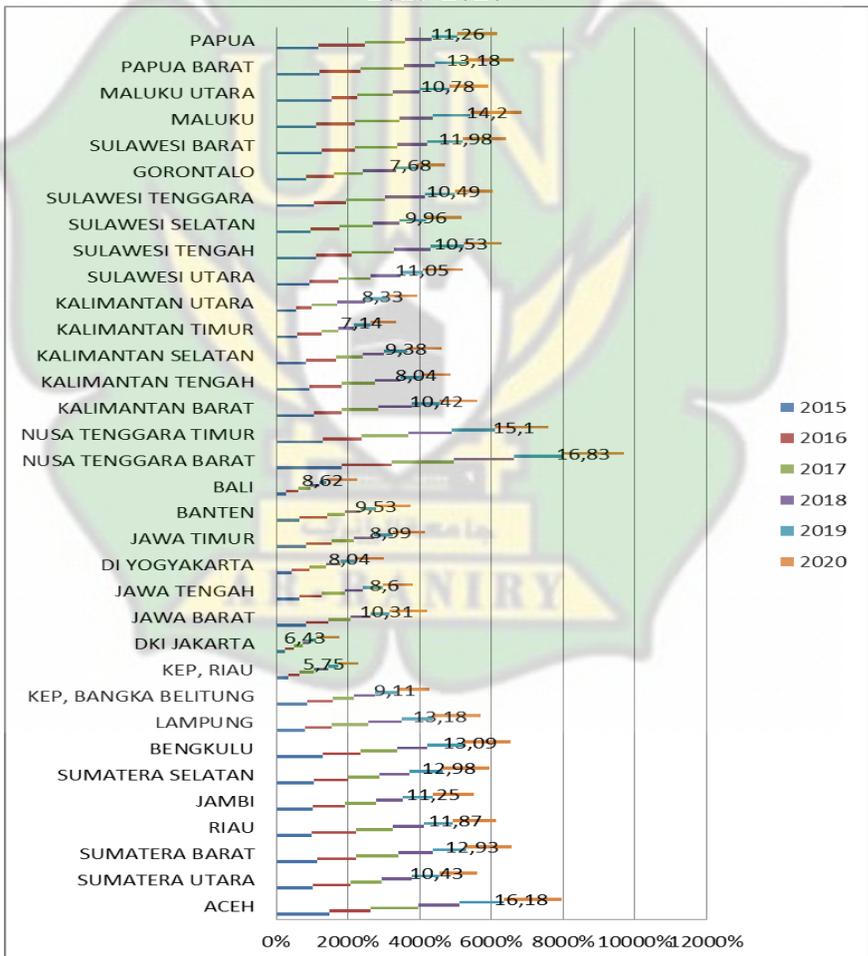
sehingga menyebabkan produktivitas barang rendah dan pendapatan yang mereka terima juga rendah (Chalid & Yusuf, 2014).

Namun faktor yang paling berpengaruh dengan kemiskinan adalah banyaknya pengangguran. Berbeda dengan minimnya UMR karena walaupun UMR kecil, masyarakat masih memiliki pendapatan tetapi tidak dengan pengangguran yang sama sekali tidak memiliki pendapatan. Walaupun sebagian besar Provinsi di Indonesia sudah mengakami kenaikan umr yang signifikan, namun masih banyak penduduk yang kekurangan pendapatan. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran memiliki kaitan yang sangat erat yang mempengaruhi kemiskinan. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan suatu usaha, serta mereka yang tidak berusaha mencari pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Pengangguran tersebut perlu di perhitungkan sebab pengangguran tersebut sangat berpengaruh terhadap masalah tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, yang disebabkan karena masalah kemiskinan (Alfredo, 2018).

Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang sangat memprihatinkan saat ini. Jumlah penganggur semakin meningkat tiap tahunnya. Pengangguran menjadi faktor utama terjadinya kemiskinan yang dapat mendorong terjadinya masalah sosial dan

juga kriminal dan dapat menyebabkan hambatan pembangunan dalam jangka panjang. Dalam hal ini akan berdampak pada suatu perekonomian dan kehidupan dalam bermasyarakat yang akan muncul bersama dengan pertumbuhan tingkat pengangguran tersebut dan mengganggu kesejahteraan masyarakat (Ahmad, 2020).

Gambar 1.3 Persentase Tingkat Pengangguran di Indonesia 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Dari Gambar 1.3 terlihat bahwa persentase pengangguran paling tinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,83% dan menjadi Provinsi dengan jumlah pengangguran paling banyak di Indonesia berturut-turut dari tahun 2015-2020. Selanjutnya pada posisi kedua jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia adalah Provinsi Aceh yaitu sebanyak 16,18% pengangguran yang selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2015-2020. Dan pada peringkat ketiga pengangguran paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 15,1%. Inilah ketiga Provinsi dengan jumlah pengangguran paling banyak di Indonesia. Sedangkan Provinsi dengan jumlah pengangguran yang paling rendah ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 6,43% pada tahun 2020 dan diikuti oleh Provinsi Kep. Riau sebanyak 5,75% dan Provinsi Bali yaitu sebanyak 8,62% pada tahun 2020 serta diikuti oleh Provinsi lain pada posisi selanjutnya.

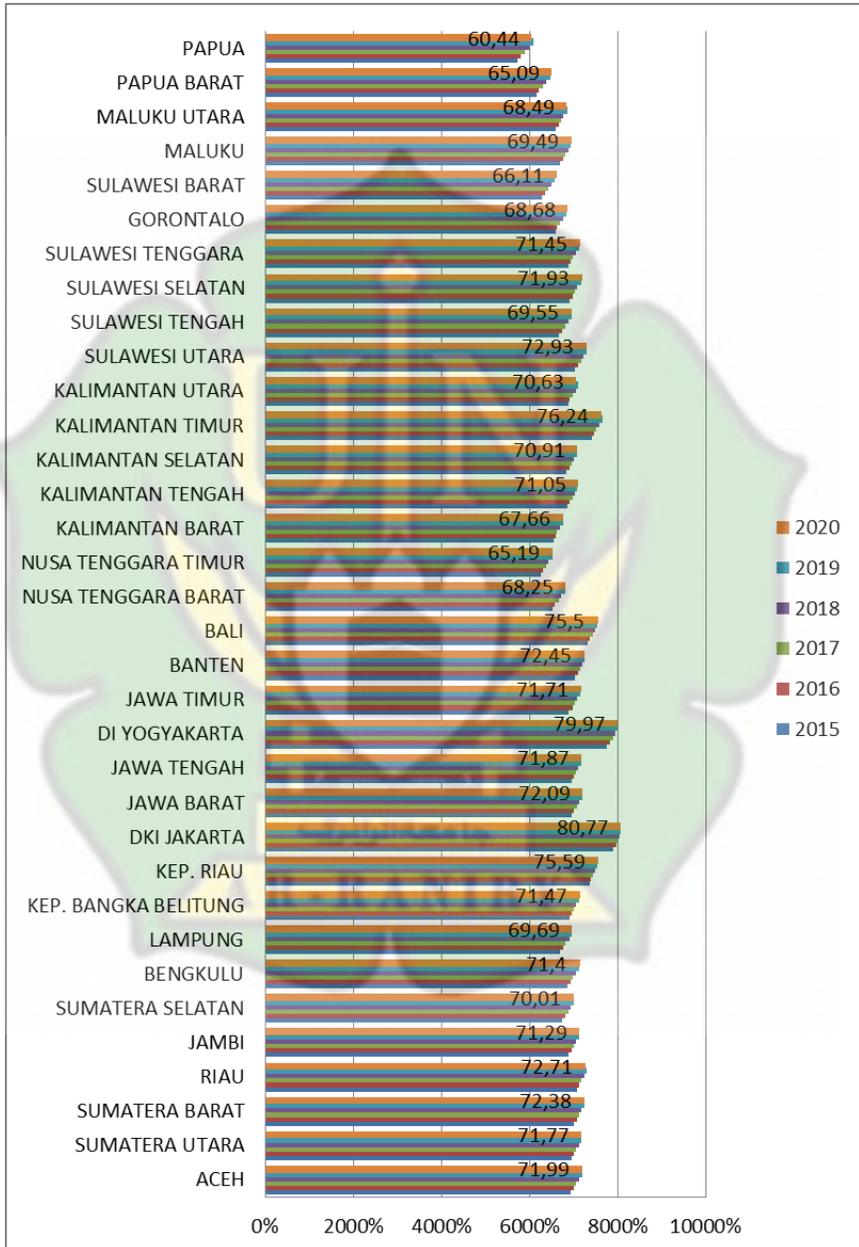
Kemiskinan memang lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, akan tetapi minim nya sumber daya manusia juga sama berpengaruhnya terhadap kemiskinan. Masyarakat yang pengangguran mungkin masih bisa bekerja jika masyarakatnya mau berusaha mencari kerja dan mempunyai keahlian tertentu, namun sangat sulit bagi masyarakat yang tidak memiliki SDM. Mereka tidak memiliki keahlian apa-apa untuk memulai bekerja dan bahkan ada yang tidak paham dengan dunia kerja. Rendahnya SDM disebabkan karena rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja dari

masyarakat. Jika produktivitas rendah maka akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan dan secara langsung sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam masyarakat (Said, 2017).

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang menerangkan bagaimana suatu penduduk dapat meng akses hasil pembangunan untuk memperoleh suatu pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator pengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang besar dengan masalah kemiskinan. Kemajuan pembangunan manusia dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena melalui Indeks Pembangunan Manusia pemerintah dapat melihat peningkatan angka kemiskinan maupun penurunan tingkat kemiskinan pada suatu daerah di indonesia (Sukmaraga, 2011).

Berikut adalah data Indeks pembangunan manusia di seluruh provinsi di Indonesia:

Gambar 1.3 Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021).

Dari Gambar 1.4 menunjukkan bahwa DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan tingkat ipm tertinggi di Indonesia di antara Provinsi-Provinsi lainnya yaitu sebanyak 80,77% pada tahun 2020. Kemudian pada posisi kedua diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 79,97% dan Provinsi ketiga dengan ipm tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur 76,24%. Ketiga Provinsi masuk kategori dengan indeks pembangunan manusia paling tinggi di Indonesia berturut-turut dari tahun 2015-2020. Sedangkan Provinsi dengan tingkat ipm terendah adalah Provinsi Papua yaitu sebanyak 60,44% pada tahun 2020. Dan pada posisi kedua yaitu Provinsi Papua Barat dengan jumlah sebanyak 65,09%, dan di peringkat ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 65,19% pada tahun 2020. Ketiga Provinsi ini menjadi Provinsi dengan tingkat ipm paling rendah di Indonesia dibandingkan dengan Provinsi lain secara berturut-turut dari tahun 2015-2020.

Akan tetapi meskipun IPM di Indonesia banyak mengalami peningkatan tetap saja angka kemiskinan masih tinggi dan masih menjadi salah satu masalah yang harus secepatnya diatasi. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia tetapi yang paling mempengaruhi saat ini adalah pengangguran, pendapatan/upah, serta sumber daya manusia (IPM) (Lestari, 2017).

Dalam penelitian sebelumnya dari Mahihody, dkk (2018) menemukan bahwa “Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado

berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan untuk indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan yang terhadap terhadap pengangguran yang ada di Kota Manado”. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Safuridar dan Putri (2019) menemukan bahwa “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur dengan hasil penelitian rata-rata daerah Aceh bagian Timur ada yang berpengaruh signifikan dan ada yang tidak berpengaruh signifikan antar variabel”.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di Indonesia merupakan dengan menciptakan berbagai lapangan kerja, memberikan modal-modal usaha untuk meningkatkan produktivitas barang, memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk menggali kemampuan dan kreatifitas yang dimiliki masyarakat sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Melalui cara ini pemerintah dapat menanggulangi masalah kemiskinan di negara indonesia (Ade & Syechalad, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian baru yang berjudul: “Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”. Penelitian ini memfokuskan pada Pengaruh Upah Minimum Regional, IPM

dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia untuk melihat pengaruh signifikan antar variabel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh upah minimum regional (UMR) terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari upah minimum regional (UMR) terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan ini di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khazanah atau wawasan mengenai keilmuan ekonomi

terutama pada masalah kemiskinan dan penyebab-penyebabnya yang dipengaruhi oleh umr, ipm, serta pengangguran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi bagi peneliti mengenai pengaruh umr, ipm, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia serta menjadi ilmu pengetahuan baru tentang ekonomi yang diperoleh selama masa perkuliahan di perguruan tinggi.

b. Bagi Umum

Manfaat penelitian ini bagi umum adalah sebagai bahan bacaan, informasi maupun referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang ingin meneliti tentang kemiskinan baik dengan menggunakan variabel yang sama maupun beda.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna terkait dengan umr, ipm, dan pengangguran yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dasar dalam pengambilan keputusan dalam mengurangi jumlah penduduk yang miskin di Indonesia.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, ruang lingkup variabel penelitian, penelitian terkait, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

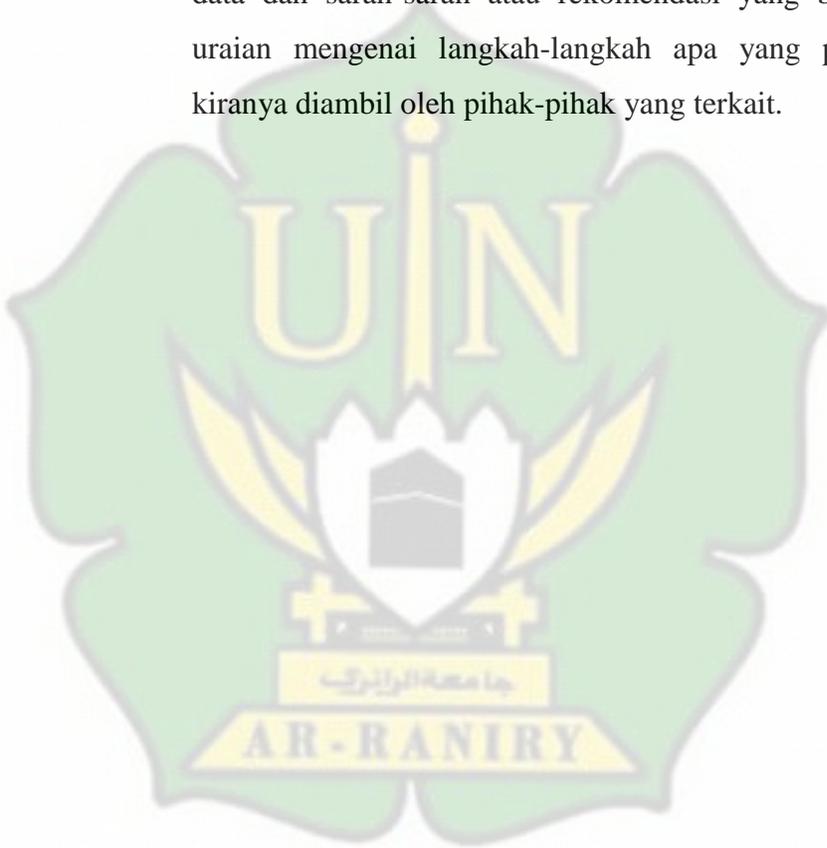
Bab ini memuat secara terperinci tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, metode analisis data, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

BAB terakhir ini berisi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data dan saran-saran atau rekomendasi yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu kiranya diambil oleh pihak-pihak yang terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan hidup pada taraf yang rendah atau kondisi dimana masyarakat tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya. Keadaan ini dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini tentu akan sangat berdampak terhadap berkurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan sosial dalam masyarakat (Elly & Usman, 2011).

Kemiskinan adalah obsesi bangsa yang menjadi masalah yang mendasar yang harus di atasi oleh penduduk miskin yang pada umum nya tidak memiliki penghasilan yang cukup atau yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Masyarakat yang miskin pada umum nya lemah dalam kemampuan berusaha dan dibatasi akses nya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya yang keadaan perekonomiannya standar dan diatas rata-rata (Abdul R, 2004).

Menurut Undang Undang No. 24 tahun 2004, kemiskinan merupakan keadaan sosial ekonomi baik seseorang maupun sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

secara layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah pendidikan, pekerjaan, air bersih, kebutuhan pangan, kesehatan, perumahan, sumber daya alam, pertanahan, lingkungan hidup, ancaman dari tindak kekerasan atau rasa aman dari perlakuan, dan hak ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Pola kemiskinan ada empat adalah, yang pertama *accidental poverty* yaitu kemiskinan akibat bencana alam yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan, yang kedua ialah *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang kronis, atau turun temurun, yang ketiga *clinical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, keempat *seasonal poverty* yaitu kemiskinan musiman yang menimpa nelayan dan petani (Abdul & Aris, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam, pertanahan, lingkungan hidup, rasa aman, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya rohani maupun spiritual.

Kemiskinan akan menyebabkan banyak masalah sosial dilingkungan masyarakat. Banyak dari masyarakat yang miskin terjerumus ke dalam perbuatan yang keji karena menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan melakukan banyak kejahatan agar bisa mendapatkan apa yang

diinginkannya seperti melakukan pencurian, perampokan, pemalingan, bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Hal ini tentu saja akan sangat meresahkan penduduk sekitar yang berada dilingkungan yang sama dengan pelaku kejahatan tersebut (Dinata, 2007).

Dalam hal ini diperlukan upaya dari pemerintah untuk meminimalisir kejadian-kejadian tersebut, dengan membuka lowongan kerja sebanyak mungkin atau memberikan bantuan kepada fakir miskin yang memang betul-betul tidak mampu dalam hal finansial. Karena salah satu penyebab kemiskinan adalah masyarakat yang sudah berusaha mencari pekerjaan namun tak dapat menemukan pekerjaan yang cocok bahkan ada yang sudah berusaha mencari namun tak kunjung diterima karena terkadang lowongan kerja di Indonesia mengutamakan latar pendidikan yang tinggi tanpa melihat skill atau kemampuan seseorang terlebih dahulu, sehingga masyarakat dengan latar pendidikan yang rendah sulit menemukan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lainnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya (Cahya, 2015).

2.1.1 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah penyebab terjadinya kemiskinan menurut (*World Bank*) ialah karena berkurangnya penghasilan ataupun pendapatan serta

asset (*lack of income and assets*) dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pakaian, tempat tinggal, tingkat kesehatan, serta pendidikan. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja mempunyai keterkaitan dan sering kali dikategorikan sebagai masyarakat miskin adalah yang tidak bekerja atau disebut pengangguran, hal lainnya juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan yang rendah dan kesehatan mereka yang pada umumnya tidak memadai (Zulkifli, 2016).

Penyebab lain terjadinya kemiskinan adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat upah minimum, pendistribusian pendapatan, inflasi, pajak, kesempatan kerja, dan subsidi. selanjutnya investasi dan alokasi serta kualitas SDA masih menjadi salah satu faktor kemiskinan. Dari segi sarana dan prasarana juga seperti fasilitas umum, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi alam, politik dalam negeri, bencana alam, serta peperangan, ini juga menjadi penyebab lainnya terjadinya kemiskinan (Kuncoro, 2004).

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

World Bank telah menentukan ukuran dari standar kemiskinan berdasarkan penghasilan atau pendapatan per kapita. Masyarakat dengan pendapatan per kapita yang kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional yang termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks ukuran standar kemiskinan

masyarakat menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang dalam sehari.

Secara umum ukuran kemiskinan menurut Mudrajat (1997) dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kemiskinan relatif, yaitu keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum dijangkau seluruh masyarakat, yang akhirnya menyebabkan ketimpangan pada sisi pendapatan.
- b. Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang mendeskripsikan keadaan dimana seseorang yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan menunjang kehidupannya.
- c. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang pada umumnya diakibatkan oleh psikis atau nilai-nilai yang dianut seseorang, serta tidak mau berusaha untuk memperbaiki taraf hidup (malas), tidak mampu menciptakan kreatifitas meskipun ada bantuan dari pihak lain.

Kebutuhan dasar atau pokok dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu kebutuhan dasar atau pokok yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development* (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia menjadi tiga kelompok:

1. Kebutuhan kultural, yaitu kebutuhan yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup.
2. Kebutuhan fisik primer, yaitu kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan yang lain yang lebih tinggi.

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Persepsi mengenai kemiskinan memang telah dikenal sejak lama antara budaya satu dengan budaya lainnya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang membedakan kelas sosial dalam masyarakat antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat biasa dan masyarakat kelas bawah. Masing-masing kelas sosial tersebut dibatasi oleh garis kemiskinan dalam masyarakat (Wulandari, 2019).

Garis kemiskinan adalah ukuran yang menyatakan besar kecilnya pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batasan seseorang dapat di katakan miskin jika di liat dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang di gunakan setiap negara berbeda, sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal tersebut di sebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup (Sukmaraga, 2011).

2.2 Upah Minimum Regional

Upah dalam teori ekonomi dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa baik itu jasa mental yang telah disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha maupun jasa fisik. Tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan dapat mempengaruhi perubahan tingkat upah (Sonny S, 2003). Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan atau pendapatan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Sebagai bentuk imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan bayaran kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai bentuk imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai dengan hasil usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Ananda, 2012).

Upah minimum merupakan suatu penerimaan perbulan minimum yang diberikan sebagai bentuk imbalan dari pengusaha

kepada karyawan karena suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk uang dan ditetapkan atas dasar persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayar atau dasar perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri atau termasuk dengan keluarganya. Upah Regional Regional merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu (Prasetyo, 2010). Sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam PP No. 8/1981 upah ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral, walaupun yang dimiliki oleh setiap daerah sekarang hanya upah minimum regional (Sinaga, 2003).

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk.I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Akan tetapi sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/200) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II)

diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK kab/kota) (Zulkifli, 2016).

Upah adalah salah satu unsur dalam menentukan harga pokok dalam sebuah perusahaan. Jika terjadi kesalahan dalam menentukan besarnya upah maka akan sangat merugikan perusahaan. Maka dari itu tinggi rendahnya tingkat upah dapat di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

a. Kemampuan untuk membayar

Pemberian upah sangat tergantung pada kemampuan membayar dari suatu perusahaan. Bagi perusahaan, upah menjadi salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah menjadi akibat dari tingginya biaya produksi, sehingga pada akhirnya akan mengurangi keuntungan.

b. Pemerintah

Peraturan-peraturan dari pemerintah sangat mempengaruhi tinggi rendahnya upah bagi tenaga kerja. Peraturan tentang upah pada umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan (Hadiman, 2018).

c. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Bagi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerjanya yang sedikit, maka upahnya akan cenderung tinggi, sedangkan jika jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun.

d. Produktivitas kerja

Dalam sebuah perusahaan, semakin tinggi prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawannya, maka akan semakin besar upah yang diterima oleh karyawan tersebut. Prestasi kerja inilah yang dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

e. Biaya hidup

Biaya hidup di kota besar tergolong tinggi, sehingga upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

f. Organisasi buruh

Ada atau tidaknya organisasi buruh serta kuat atau lemahnya organisasi buruh akan mempengaruhi tingkat upah. Dengan adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah dan sebaliknya.

Kebijakan tentang upah minimum di Indonesia tertuang didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari

penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja.

Adapun tujuan penetapan upah minimum menurut Rachman (2005), dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Secara Makro

- a. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja
- b. Pemerataan pendapatan
- c. Peningkatan produktivitas kerja nasional
- d. Perubahan struktur biaya industry sektoral
- e. Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha
- f. Peningkatan etos dan disiplin kerja

2. Secara Mikro

- a. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.
- b. Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot
- c. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan

Tujuan utama penetapan UMP adalah sebagai “jaring pengaman” yang berfungsi untuk mencegah agar upah tidak terus merosot di bawah daya beli pekerja. Dan alasan mengapa UMP/UMK terus dinaikkan bertujuan; pertama, dari aspek makro, diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta ekonomi rakyat. Kedua, untuk mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi hingga terendah yang dibayar

oleh perusahaan kepada pekerja. Ketiga, kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan penghasilan pekerja pada jabatan yang terendah dalam perusahaan tersebut (Wati, 2020).

Hal yang paling prinsip dalam kebijakan upah minimum merupakan suatu upaya menciptakan penghasilan yang layak bagi para pekerja ataupun buruh, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Tujuannya untuk mencegah kesewenang-wenangan pengusaha sebagai pemberi upah dalam memberikan upah kepada para pekerja atau buruh yang baru masuk kerja. Lebih spesifik lagi bahwa kebijakan upah minimum dimaksud sebagai suatu upaya perlindungan terhadap para pekerja atau buruh baru yang tingkat pendidikannya lebih rendah, tidak mempunyai pengalaman, masa kerja dibawah 1 tahun dan lajang atau belum berkeluarga (Shintia, 2001).

Sasaran dari kebijakan ini bertujuan untuk menutupi kebutuhan kebutuhan hidup para pekerja dan keluarganya. Kebijakan upah minimum menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan baik di negara maju ataupun negara berkembang. Kebijakan upah minimum diantaranya:

- a) Meningkatkan produktifitas para pekerja.
- b) Mengembangkan serta meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien

- c) Menjamin penghasilan para pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu (Sumarsono, 2003).

Upah adalah salah satu komponen biaya produksi yang mampu mengurai tingkat laba yang dihasilkan bagi sebuah perusahaan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut hingga ke tingkat yang paling rendah, dengan begitu laba perusahaan akan meningkat. Tidak banyak pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan selain untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Begitupun dengan pekerja yang menganggap upah sebagai bayaran atas jasa yang telah dikerjakan sehingga pekerja akan menuntut upah yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhannya agar mereka bisa hidup dengan sejahtera, namun kenyataannya, sedikit sekali pengusaha yang mengerti dan dengan sukarela meningkatkan taraf hidup para karyawannya terutama para pekerja pada golongan paling rendah. Upaya yang harus dilakukan untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja, pemerintah perlu mengatur menyangkut masalah upah yang sekarang dikenal dengan istilah upah minimum. Tujuannya adalah untuk menstabilkan tingkat upah agar tidak merosot ke bawah, meningkatkan daya beli pekerja yang paling rendah serta memperkecil kesenjangan antara mereka yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi (Sinaga, 2003).

Kenaikan upah minimum bagi para pekerja akan meningkatkan daya beli mereka yang pada akhirnya akan

mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Namun bagi perusahaan yang menganggap upah adalah biaya, maka kenaikan upah akan menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada para pekerja sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pengusaha akan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi (Atiyatna, 2016).

Tingkat upah minimum ditentukan oleh beberapa pihak yang berkaitan yaitu pemerintah dalam bagian Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan sebuah lembaga independen yang terdiri dari pakar, praktis dan sebagainya yang bertugas untuk memberi masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi para pekerja, serta wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Masing-masing mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan di daerah tertentu untuk mengambil keputusan apakah tingkat upah minimum tersebut sudah dapat dinaikkan atau belum.

Suatu hal yang dapat diambil sebagai dasar pertimbangan penentuan upah minimum yaitu:

1. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN secara nyata.
2. Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.
3. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah.
4. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
5. Merupakan indikator perkembangan ekonomi Perdapatan Perkapita.
6. Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak-hak dasar buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia.

Upah minimum yang tinggi akan menunjukkan penghasilan ekspektasi (*expected return*) pekerja semakin tinggi pula, sehingga mendorong pekerja agar berpindah dari pasar kerja berpendidikan rendah ke pasar kerja berpendidikan tinggi. Namun hal ini tidak berpengaruh signifikan, dikarenakan tidak semua perusahaan dalam suatu provinsi benar-benar menerapkan kebijakan upah minimum. Sedangkan dari sisi lain, tingkat upah yang tinggi akan mampu mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja berpendidikan tinggi sehingga dampaknya pada peningkatan upah minimum tersebut pada sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah pengangguran (Ananda, 2012).

2.3 Indek Pembangunan Manusia

IPM merupakan suatu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah atau negara dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat). IPM digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh dalam suatu wilayah. IPM menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah/negara, dan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah, yang mencakup tiga dimensi mendasar (umur panjang/hidup sehat, standar hidup layak dan pendidikan/pengetahuan). IPM juga merupakan gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan suatu program pembangunan dalam periode tertentu dapat diukur oleh besaran IPM di awal dan akhir periode tersebut (Badan Pusat Statistik).

Dalam IPM umur panjang dan hidup sehat digambarkan berdasarkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita harus disesuaikan, dan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan

Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal. IPM adalah indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum oleh masing-masing komponen indeks. Untuk menganalisis kemajuan pembangunan manusia, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian (Najmi, 2019).

Indeks pembangunan adalah merupakan ukuran capaian pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar dari kualitas hidup. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Feriyanto, 2014).

Menurut BPS (2007), IPM adalah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM mendeskripsikan cara agar penduduk dapat menjangkau hasil pembangunan seperti menghasilkan pendapatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM mendeskripsikan beberapa komponen, merupakan capaian umur panjang dan sehat yang mewakili; angka melek huruf, partisipasi sekolah, bidang kesehatan dan rata-rata lamanya bersekolah

mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Davies dan Quinlivan (2006) mengatakan bahwa IPM merupakan pengukuran perbandingan harapan hidup, pendidikan, melek huruf dan standar hidup di semua negara dari berbagai belahan dunia. IPM dapat mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu:

1. Standar kehidupan yang layak diukur menggunakan GDP per kapita produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah atau *gross enrolment ratio*.
3. Hidup sehat serta panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.

Alhudori (2017) menjelaskan tiga komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Kesehatan

Dalam Indeks Pembangunan Manusia komponen kesehatan ini tercermin dalam usia harapan hidup masyarakat yaitu dengan rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Angka Harapan Hidup, terdapat dua jenis yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai

maksimum harapan hidup yang sesuai dengan standar UNDP, batas umur tertinggi yaitu 85 dan terendah yaitu 25.

2. Komponen Pendidikan

Dalam komponen pendidikan yaitu berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Melek Huruf (AMH) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Sesuai dengan standar UNDP batas maksimum 100 batas minimum 0. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menempuh semua jenjang pendidikan formal. Batas maksimum rata-rata lama sekolah yaitu 15 tahun, dan batas minimumnya ialah 0 tahun.

3. Komponen daya beli

Komponen daya beli yaitu berdasarkan Pendapatan Per kapita Riil yang disesuaikan yaitu rata-rata jumlah pengeluaran per kapita penduduk yang distandarkan dengan mendeflasikan melalui harga konsumen.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas manusia, yaitu:

1. Meskipun dapat menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, namun IPM belum tentu mencerminkan kondisi akan tetapi IPM menjadi satu-satunya indikator yang dapat digunakan

sebagai alat ukur pembangunan kualitas hidup manusia (Safuridar, 2019).

2. IPM menjadi salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup terhadap masyarakat atau penduduk.
3. IPM mendeskripsikan tentang bagaimana manusia bisa mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan sebagai bagian dari hak mereka seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.
- b. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini:

- a. Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP)
- b. Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi,
- c. Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup (Rosalia, 2019).

2.4 Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan ataupun keadaan dimana seseorang sedang tidak memiliki pekerjaan, dan tidak berinisiatif dalam mencari pekerjaan (Hadiman, 2018).

Pengangguran merupakan mereka yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan sama sekali karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan, angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Pengangguran dengan konsep tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (open unemployment). Secara umum, pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja

(labor force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang dalam proses mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran. Selain itu, pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya” (Kuncoro, 2013).

Minimnya pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup mereka. Pengangguran yang berkepanjangan juga akan dapat menimbulkan efek pada psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang dari pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita dalam suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "*pengangguran terselubung*" dimana pekerjaan yang semestinya dapat dilakukan dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang (Ananda, 2012).

Menurut Sukirno (2000), pengangguran dibagi menjadi empat jenis berdasarkan penyebabnya antara lain:

a. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang bersifat sementara disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Mereka yang menganggur bukan berarti tidak memperoleh pekerjaan tetapi tindakan seseorang pekerja meninggalkan pekerjaannya demi mencari pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.

b. Pengangguran Alamiah

Pengangguran ini berlaku pada tingkat kesempatan kerja dalam waktu yang penuh. Kesempatan kerja penuh merupakan keadaan dimana seseorang sekitar 95% dari angkatan kerja mampu dan bersedia dalam suatu waktu sepenuhnya untuk bekerja.

c. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan gelombang kehidupan perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami masalah resesi (kemunduran) dan masa depresi (kehancuran) yang mengakibatkan terjadinya pengurangan dalam agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja yang berujung dengan gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menyebabkan berlakunya pengangguran struktural yaitu perkembangan teknologi, kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah

lain, dan kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang lebih pesat dikawasan lain.

Berdasarkan hasil survey *Institute Development of economics and finance* jumlah pengangguran terdidik dari lulusan SMA hingga lulusan perguruan tinggi semakin membengkak yang diimplikasikan terjadinya pengangguran intelektual yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena:

- a. Para sarjana cenderung mau bekerja pada sektor padat modal
- b. Sekitar 40% sarjana yang baru lulus ingin segera bekerja dengan jumlah gaji yang besar
- c. Ketidakseimbangan struktur atas dan struktur bawah
- d. Ingin mencari pekerjaan yang lebih baik sementara kapasitas lapangan yang tersedia terbatas
- e. Ketidaksesuaian sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja
- f. Kualitas tenaga kerja
- g. Regulator power dan lemahnya koordinasi antara departemen.

Pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan perlunya pengembangan tingkat pendidikan sebagai bentuk usaha untuk membangun tingkat perekonomian. *Pertama*, pengetahuan yang lebih baik dapat diperoleh dan pendidikan dapat menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-

pembaharuan dibidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. *Kedua*, pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas. *Ketiga*, pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mempelajari berbagai macam pengetahuan-pengetahuan teknik yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan modern. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung melalui kemajuan teknologi yang digunakan masyarakat (Ananda, 2012).

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya:

- a. Setengah Menganggur, yaitu kondisi dimana seseorang tidak bekerja secara optimal dibawah jam kerja normal karena tidak lowongan pekerjaan.
- b. Pengangguran Terbuka, yaitu pengangguran yang timbul akibat adanya penambahan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, hal ini berakibat pada tenaga kerja yang menganggur.
- c. Pengangguran Musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada musim-musim tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi dalam sektor pertanian, seperti pada musim tanam dan musim panen.
- d. Pengangguran Tertutup, yaitu pengangguran yang terjadi karena kuantitas tenaga kerja yang lebih dalam suatu unit

yang diperlukan. Padahal jika dengan pengurangan tenaga kerja tidak akan mempengaruhi jumlah produksi.

Penyebab utama orang menganggur adalah dari faktor pribadi dan faktor sistem sosial dan ekonomi. Berdasarkan faktor pribadi, berikut adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi pengangguran.

a. Faktor fisik (cacat)

Karena hidup dalam sistem kapitalis hukum yang diterapkan adalah “hukum rimba”. Maka dari itu bagi mereka yang memiliki kekurangan secara fisik (cacat) tidak memiliki tempat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan keadaan mereka.

b. Faktor rendahnya SDM dan tingkat pendidikan

Banyak tenaga kerja di Indonesia yang sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang hanya lulusan SD atau SMP saja. Sehingga berdampak pada kualitas SDM yang mereka miliki rendah dan tidak memiliki ketrampilan yang bisa diandalkan untuk mencari pekerjaan yang cocok. Ditambah lagi dengan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak berfokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan untuk keahlian bekerja. Sehingga akhirnya mereka tidak dapat mencari pekerjaan dan menjadi pengangguran intelektual.

c. Faktor perilaku (kemalasan)

Banyaknya pengangguran yang disebabkan dari kemalasan mereka sendiri sebenarnya sedikit. Namun, karena dalam sistem materialis dan politik sekularis, menjadi pemicu masyarakat

menjadi malas, seperti sistem penggajian yang tidak sesuai atau maraknya perjudian sehingga orang miskin menjadi malas untuk bekerja dan berharap memiliki kekayaan dengan cara yang instan melalui perjudian dan menang undian.

Sedangkan penyebab pengangguran berdasarkan faktor sistem sosial dan ekonomi diantaranya:

- a. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan
- b. Perkiraan permintaan tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukan karena banyaknya tenaga kerja yang tersedia sedangkan yang mampu ditampung dari sebagian saja sehingga sisanya menjadi pengangguran.

Namun penyebab yang paling umum banyaknya pengangguran di Indonesia adalah karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk menampungnya. Sehingga pengangguran semakin meningkat dan menjadi masalah dalam perekonomian serta pertumbuhan dalam suatu negara atau daerah karena produktivitas dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan munculnya masalah-masalah sosial lainnya.

2.5 Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian tentang kemiskinan yang sebelumnya telah diteliti oleh sejumlah peneliti lainnya, untuk dijadikan perbandingan serta menemukan ide baru untuk penelitian ini dan penelitian seterusnya. Walaupun tidak semua variabel yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya namun inilah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian Safuridar dan Putri (2019), tentang “pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Aceh Bagian Timur”. Dari hasil analisis ini diketahui indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran secara parsial berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Serta jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota/Kabupaten Aceh Bagian Timur. Namun secara simultan pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan jumlah penduduk di Kota/Kabupaten Aceh Bagian Timur berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Safuridar, 2019).

Penelitian Dinata (2020), “tentang pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Riau”. Dari penelitian yang sudah dilakukan, di peroleh hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kemiskinan. Kemudian Kemudian Pertumbuhan Ekonomi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan Tingkat Pengangguran tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga memperoleh hasil dari keempat variabel yakni Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk serta Tingkat Pengangguran secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Persentase pengaruh keempat variabel tersebut adalah 95.1 %, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain (Dinata, 2007).

Penelitian Feby dan Syechalad (2016), “tentang analisis pengaruh pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Aceh”. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Aceh (Ade & Syechalad, 2016).

Penelitian oleh Novianto (2018) “tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ipm, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota/Kabupaten Jawa Tengah. Serta inflasi

berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kota/Kabupaten Jawa Tengah. Jadi kesimpulannya ialah pertumbuhan ekonomi, ipm, inflasi dan pengangguran secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah (Novianto, 2018).

Penelitian Sukmaraga (2011) “analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (ipm) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah (Sukmaraga, 2011).

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

NO	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur”. (Safuridar dan Putri, 2019).	Metode deskriptif kualitatif dengan analisis regresi berganda.	Sama-sama meneliti tentang variabel yang sama yaitu indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan.	Lokasi penelitian di Aceh Bagian Timur. Terdapat variabel independen yang berbeda yaitu jumlah penduduk.	Hasil penelitian secara simultan pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan jumlah penduduk di Kota/Kabupaten Aceh Bagian Timur berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2.	“Analisis Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh”. (Feby dan Sychalad, 2016).	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square (OLS)</i> .	Sama-sama meneliti tentang variabel yang sama yaitu pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan.	Lokasi penelitian di Aceh. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel penelitian.	Hasil dari penelitian ini adalah variabel pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

Tabel 2.1-Lanjutan

3.	<p>“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah”. (Sukmaraga, 2011)</p>	<p>Metode analisis regresi linear berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang variabel ipm, pengangguran, dan kemiskinan.</p>	<p>Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan variabel pdrb per kapita sebagai variabel penelitian.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (ipm) dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.</p>
4.	<p>“Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018”. (Dinata (2020)</p>	<p>Metode Kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang variabel ipm, pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>Lokasi penelitian di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

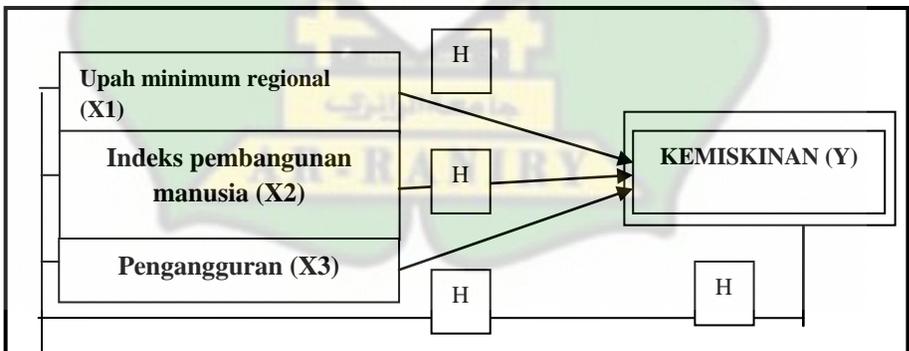
5.	“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. (Novianto, 2018)	Analisis Regresi Data Panel.	Sama-sama meneliti tentang variabel ipm, pengangguran dan kemiskinan.	Lokasi penelitian di Kab/Kota Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.	Hasil penelitiannya yaitu pertumbuhan ekonomi, ipm, inflasi dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
----	---	------------------------------	---	---	--

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian peneliti mendeskripsikan kerangka pemikiran untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan untuk memperjelas akar pemikiran dari penelitian ini. Peneliti menyusun kerangka konseptual berdasarkan variabel yang diteliti dalam penelitian yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen diantaranya Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran. Sedangkan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini merupakan Kemiskinan. Tinggi atau rendahnya Upah Minimum Regional akan

mempengaruhi Kemiskinan. Semakin tinggi UMR maka semakin rendah tingkat kemiskinan dan sebaliknya, semakin rendah UMR maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Jika tingkat SDM rendah maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi dan meningkat dan sebaliknya jika SDM suatu masyarakat tinggi maka tingkat kemiskinan angka menurun. Penyebab lain kemiskinan yang paling banyak saat ini adalah Pengangguran. Banyaknya pengangguran sangat mempengaruhi angka kemiskinan suatu daerah, semakin banyak pengangguran semakin tinggi tingkat kemiskinan dalam suatu Daerah atau Provinsi dan jika jumlah pengangguran kecil maka tingkat kemiskinan juga akan kecil. Berikut peneliti menggambarkan kerangka konseptual secara skematis:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.7 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.7.1 Hubungan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu indikator untuk mengatasi tingkat pengangguran. Melalui upah minimum regional kemiskinan akan terminimalisir karena dapat mengatasi masalah pengangguran dalam masyarakat. Upah yang tinggi akan menyebabkan turunnya jumlah pekerja dan mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi. Upah yang tinggi akan mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. Dengan begitu, perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kemiskinan yang pasti akan terjadi (Said, 2017). Masyarakat dengan upah minimum regional yang rendah dalam suatu daerah atau wilayah memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang rendah juga, dan sebaliknya jika upah minimum regional tinggi maka masyarakat daerah ataupun wilayah tersebut memiliki standar hidup serta tingkat konsumsi yang tinggi pula. Melalui pemberian Upah Minimum Regional akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat meminimalisir masalah kemiskinan. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Sukmaraga, 2011).

2.7.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Peranan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui pendidikan, manusia mampu meningkatkan kualitas sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga dengan ini akan mendorong peningkatan produktivitas orang tersebut (Farathika, 2020). Disisi lain, perusahaan juga akan memperoleh timbal balik dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dengan begitu pihak perusahaan juga tidak akan keberatan jika harus membayar karyawannya dengan gaji yang lebih tinggi. Dari segi sektor pertanian, tingkat keahlian dan keterampilan akan dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi karena adanya tenaga kerja yang kompeten maka semua menjadi lebih efisien. Jadi, jika kualitas SDM tinggi maka tingkat kemiskinan akan terminimalisir (Sinaga, 2003).

2.7.3 Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan

Pengangguran menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan karena masyarakat yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah karena tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran akan menyebabkan menurunnya tingkat

kemakmuran hidupnya (Safuridar, 2019). Pengangguran menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin menurun sehingga akan mempengaruhi peningkatan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan sama sekali. Dan jika pengangguran dalam suatu daerah tinggi maka akan berdampak buruk juga pada negara tersebut karena akan menyebabkan terjadinya kekacauan politik, sosial, menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka yang panjang (Sukirno, 2004).

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau anggapan sementara. berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, dan setelah melakukan pengamatan tentang hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen maka terdapat beberapa hipotesis yang mendasari penelitian ini diantaranya:

- H_{o1} : Upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
- H_{a1} : Upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.
- H_{o2} : Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
- H_{a2} : Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

H_{o3} : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

H_{a3} : Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang tepat dan akurat tidak terlepas dari metodologi yang tepat, maka dari itu peneliti harus menentukan jenis metode yang akan digunakan dalam penelitian ini karena metodologi penelitian sangat berpengaruh dalam menentukan hasil penelitian yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu jenis penelitian yang dapat diklasifikasikan, dapat diamati, dapat diukur, hubungan antar variabel yang bersifat sebab akibat, penelitian kemudian memuat tentang permasalahan yang ada, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan mengolahnya untuk pengambilan sebuah keputusan. Penelitian ini adalah penelitian jenis kuantitatif asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara 2 variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:26).

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang berada di antara Benua Australia dan Benua Asia. Alasan penulis melakukan penelitian di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang masih naik turun setiap tahunnya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi ialah keseluruhan dari orang yang menjadi sasaran atau objek penelitian baik itu manusia, benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek dalam penelitian (Arikunto, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah data penduduk miskin, data upah minimum regional, data indeks pembangunan manusia, dan data pengangguran di Indonesia yang telah terdata dalam BPS.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2014) definisi dari sampel adalah bagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel harus diambil dari bagian populasi untuk mewakili dari jumlah keseluruhan populasi yaitu data penduduk miskin, data upah minimum regional, data indeks pembangunan manusia, dan data pengangguran dari tahun 2015-2020 di 34 Provinsi di Indonesia.

Pengambilan sampel merupakan langkah untuk melaksanakan penelitian serta yang akan menentukan hasil dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan dari tahun 2015-2020 di 34 Provinsi di Indonesia.

3.3 Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif ini terdiri dari data jumlah penduduk miskin, data upah minimum regional, data indeks pembangunan manusia, serta data jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2015-2020.

Sumber data akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berikut uraian data yang diperoleh oleh peneliti:

1. Data Kemiskinan Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
2. Data Upah Minimum Regional Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
3. Data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
4. Data Pengangguran Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data-data arsip pada Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu meliputi data jumlah penduduk miskin, data upah minimum regional, data indeks pembangunan manusia, serta data jumlah pengangguran. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik studi atau literatur pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional adalah sebuah istilah yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (M. Nasir, 1998). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependent dan variabel independent.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen atau dengan kata lain disebut variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas.

Kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam menghasilkan pendapatan stabil untuk memenuhi hak-hak dasar serta perbedaan

perlakuan sebagai seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial secara bermartabat (Ade & Syechalad, 2016). Satuan ukur variabel kemiskinan adalah jiwa.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel Independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan variabel dependen atau variabel terikat.

1. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu indikator untuk mengatasi tingkat pengangguran. Masyarakat dengan upah minimum regional yang rendah dalam suatu daerah atau wilayah memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang rendah juga, dan sebaliknya jika upah minimum regional tinggi maka masyarakat daerah ataupun wilayah tersebut memiliki standar hidup serta tingkat konsumsi yang tinggi pula (Sukmaraga, 2011). Satuan ukur variabel upah minimum regional adalah rupiah.

2. Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya (Sinaga, 2003). Satuan ukur variabel indeks pembangunan manusia adalah jiwa.

3. Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan suatu usaha, serta mereka yang tidak berusaha mencari pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Pengangguran perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, yang disebabkan karena masalah kemiskinan (Lestari, 2017). Satuan ukur variabel pengangguran adalah jiwa.

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel. metode analisis data panel yaitu gabungan atau kombinasi antara *time series* (deret waktu) dan data *cross section* (Deret hitung). Dalam estimasi model analisis regresi data panel biasanya dilakukan dengan tiga pendekatan adalah: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* (Widarjono, 2013). Adapun fungsi estimasi data panel yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Kemudian fungsi tersebut dibentuk sebagai model ekonometrika dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$KM_{it} = \alpha + \beta_1 UMR_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PG_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana:

KM = Kemiskinan

UMR = Upah Minimum Regional

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PG = Pengangguran

α = Intercept/konstanta

β = Koefisien Regresi

e = *Term of Error*.

it = variabel individu ke-I dan periode ke-t

3.6.1 Model Regresi Data Panel

1. Model *Common Effect*

Model *common effect* merupakan model estimasi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Dengan menggabungkan data yang kita punya tanpa memperhatikan perbedaan individu maupun waktu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2013). Berikut adalah bentuk persamaan model *common effect*.

$$KM_{it} = \alpha + \beta_1 UMR_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_n PG_{nit} + e_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan:

KM = Kemiskinan

UMR = Upah Minimum Regional

IPM= variabel independen

PG = Pengangguran

i = variabel individu ke-I dan periode ke-t

α = *Konstanta*

β = *Koefisien regresi*

e = *Error term*

2. Model *Fixed Effect*

Didalam model *fixed effect* diasumsikan bahwa terdapat efek yang memiliki perbedaan antar individu. Didalam model *fixed effect* dapat variabel menggunakan *dummy* sebagai alat yang digunakan untuk mengestimasi data panel yang ingin kita teliti. Model estimasi ini disebut juga dengan *Least Squares Dummy Variable (LSDV)* (Widarjono, 2013). Model *fixed effect* menggunakan teknik variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut:

$$KM_{it} = \alpha + \beta_1 UMR_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PG_{it} + \beta_4 D_{1i} + \beta_5 D_{2i} + \dots + e_{it} \dots (3.4)$$

Keterangan:

KM = Kemiskinan

UMR = Upah Minimum Regional

IPM= variabel independen

PG = Pengangguran

i = variabel individu ke-I dan periode ke-t

α = *Konstanta*

β = *Koefisien regresi*

e = *Error term*

D = *dummy*

3. Model *Random Effect*

Model *random effect* merupakan asumsi koefisien *slope* konstan dan intersep berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Didalam model *fixed effect* variabel *dummy* berfungsi untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan model *random effect* atau menggunakan variabel gangguan (*error terms*).

Model tepat yang digunakan untuk mengestimasi *random effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) sebagai estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi dan *least square* (Widarjono, 2013). Model dalam *random effect* ditulis sebagai berikut:

$$KM_{it} = \alpha + \mu + \beta_1 UMR_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PG_{it} + e_{it} \dots (3.5)$$

Keterangan:

KM = Kemiskinan

UMR = Upah Minimum Regional

IPM= variabel independen

PG = Pengangguran

it = variabel individu ke-I dan periode ke-t

α = *Konstanta*

β = *Koefisien regresi*

e = *Error term*

μ = bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku kabupaten/kota secara individu.

3.6.2 Uji Goodness of Fit

Pemilihan model dalam sebuah penelitian sangat perlu untuk dilakukan. Untuk pemilihan model yang tepat maka perlu dilakukan metode-metode pengujian yaitu dengan melakukan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* sebagai berikut:

1. Uji Chow (Chow Test)

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model yang akan digunakan apakah model *common effect* atau *fixed effect*. Uji signifikansi *fixed effect* digunakan untuk pengambilan keputusan apakah model dengan asumsi *slope* dan intersep tetap antar individu dan antar waktu (*common effect*), ataukah diperlukan penambahan variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep (*fixed effect*). Dalam uji ini akan dibandingkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pemilihan model *common effect* atau pooled OLS jika probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 10%.

H_1 : Pemilihan model *fixed effect* jika probabilitas F statistiknya signifikan pada α 10%.

Dasar penolakan terhadap hipotesis tersebut adalah dengan perbandingan perhitungan F-statistiknya dengan F-tabel. Dalam perbandingan tersebut jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 dan diterima, begitupun sebaliknya.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik yang dilakukan dalam memilih apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang tepat untuk digunakan. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pemilihan model *random effect*, jika nilai chi-squarenya tidak signifikan pada α 10%.

H_1 : Pemilihan model *fixed effect* jika nilai chi-squarenya signifikan pada α 10%.

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k yaitu jumlah variabel independen. Apabila hipotesis nol ditolak dan nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat yaitu model *fixed effect* sedangkan sebaliknya apabila hipotesis nol diterima yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat yang harus dipilih yaitu model *random effect* (Widarjono, 2013).

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk memilih apakah model dengan pendekatan *random effect* lebih baik digunakan dibandingkan dengan menggunakan model OLS pada pendekatan *common effect*. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pemilihan model *common effect* sebagai model terbaik

H_1 : Pemilihan model *random effect* sebagai model terbaik.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa jika H_0 diterima maka H_1 akan ditolak, begitu pula sebaliknya jika H_1 diterima H_0 akan ditolak.

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model panel terbaik peneliti melakukan pengujian asumsi klasik. Tujuan melakukan uji asumsi klasik adalah untuk memastikan hasil penelitian yang dilakukan valid dan sesuai dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2013) dalam (Febrina dan Yulianto, 2017). Metode estimasi data panel *common effect* dan *fixed effect* menggunakan *ordinary least square* (OLS) sedangkan metode estimasi model panel pengaruh acak atau *random effect* menggunakan metode *generalized least square* (GLS). Karena kelebihan dari metode GLS yaitu tidak perlu untuk melakukan pengujian asumsi klasik sedangkan metode estimasi OLS wajib melakukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2009) dalam (Handayani, Isfahani dan Widodo, 2019)

1. Uji Normalitas

Uji asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual. Metode yang digunakan *Jarque-Bera Test* (J-B Test) dan metode grafik. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *histogram* yang dapat dilihat dari uji *Jarque-Bera*. Residualnya dapat dinyatakan normal apabila probabilitas dari uji *Jarque-Bera* lebih besar ($>$) daripada alpha 0,10 dan sebaliknya jika probabilitas dari uji *Jarque-Bera*

bernilai lebih kecil ($<$) dari alpha 0,10 maka residualnya dinyatakan tidak berdistribusi normal (Gujarati, 2004) dalam (Yuliana dan Sitorus, 2018).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2013). Cara untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas apabila nilai probabilitas $< (\alpha = 0.10)$ maka H_0 ditolak yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila nilai probabilitas $> (\alpha = 0.10)$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ciptaningsih, 2010) dalam (Elvianto dan Kartikasari, 2015).

H_0 = Homokedastisitas

H_a = Heteroskedastisitas

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang ada pada periode lain atau lebih tepatnya variabel gangguan tidak random. Nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Dubin Watson (dl dan du) adalah cara yang digunakan untuk mengetahui autokorelasi

(Gujarati, 2004) dalam (Yuliana dan Sitorus, 2018) dengan kriteria berikut:

Jika $du < dw$ = artinya tidak terjadi autokorelasi, dan

Jika $dw < 4-du$ = artinya tidak terjadi autokorelasi.

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya antara variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk penelitian ini. Adapun uji yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini diantaranya uji Parsial, uji Simultan, serta uji Koefisien Determinasi.

1. Uji T-Statistik (Uji Parsial)

$T \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$T \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F-Statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau hubungan variabel-variabel independen keseluruhan secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai $F\text{-hitung}$ dengan $F\text{-tabel}$. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan sebaliknya, jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_1 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan sebuah model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat). Nilai R^2 adalah satu, jika mendekati 0 maka dapat dikatakan bahwa kemampuan suatu variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas dan kecil. Sedangkan jika nilai sebuah variabel mendekati 1 maka variabel independen tersebut akan memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali C.d., 2002).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Peta Provinsi di Indonesia

Gambar 4.1 Peta Provinsi di Indonesia



Sumber: Badan Bahasa Kemdikbud (Istimewa)

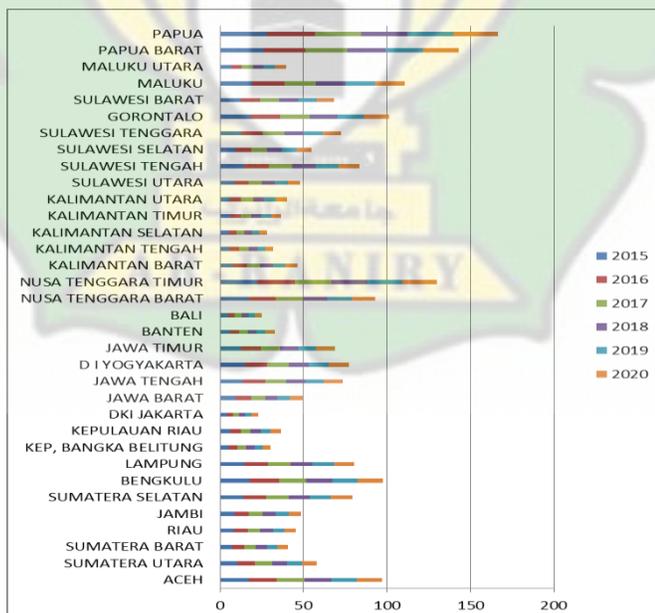
Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut bahwa Indonesia memiliki 34 Provinsi diantaranya: Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Dki Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, D I Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua (Badan Pusat Statistik, 2020).

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat berada pada taraf hidup yang rendah serta tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi standar kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya dalam periode 2015-2020 yang diukur dalam satuan jiwa. Banyak hal yang menjadi faktor kemiskinan, diantaranya yaitu upah minimum regional, sumber daya manusia, serta tingkat pengangguran. Data persentase tingkat kemiskinan ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2015-2020.

Gambar 4.2 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

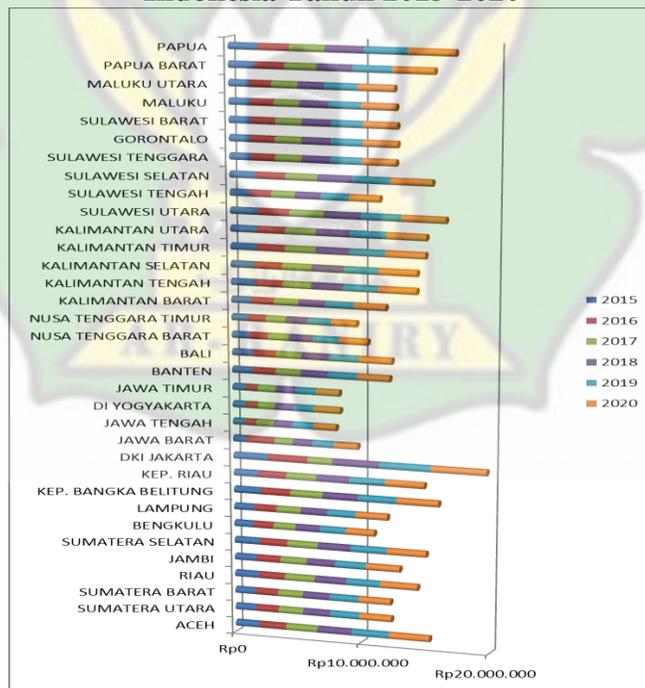
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 10% serta meningkat sekitar 1-2% pertahunnya. Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia ditempati oleh Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,64% pada akhir tahun 2020. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti rendahnya sumber daya manusia (SDM), meningkatnya jumlah pengangguran, dan tingkat upah minimum yang relatif rendah. Namun bukan hanya faktor dari luar, faktor dari dalam seperti kemalasan juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu tingkat kemiskinan yang paling rendah di Indonesia ditempati oleh Provinsi Bali dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,78% pada tahun 2020. Rata-rata tingkat kemiskinan tiap Provinsi diseluruh Indonesia diatas 6%.

4.2.2 Upah Minimum Regional

Upah minimum regional merupakan bayaran atau hasil pendapatan atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang sebagai tenaga kerja sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh atasannya. Besaran upah minimum menentukan kemakmuran hidup masyarakat dalam suatu negara. Upah menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari para pekerja serta keluarganya. Satuan ukur atau indikator upah minimum regional adalah rupiah.

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa upah minimum tertinggi di Indonesia yaitu di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah umr sebesar R4.267.349 pada tahun 2020. Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan upah pada tahun 2015 dan 2016, namun pada tahun 2017 upah minimum di DKI Jakarta sempat menurun drastis sebelum akhirnya kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan Provinsi dengan jumlah umr terendah yaitu Provinsi Provinsi Jawa Timur dengan umr sebesar Rp1.768.777 serta Provinsi Jawa Barat dengan umr Rp1.810.350 masing-masing pada tahun 2020. Inilah Provinsi-Provinsi dengan tingkat umr paling rendah di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Gambar 4.3 Data Tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2015-2020

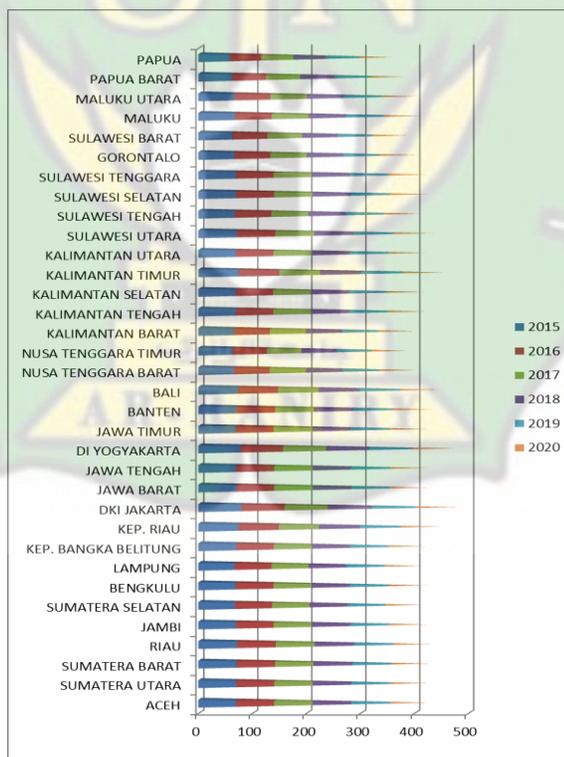


Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan satuan ukur untuk menjelaskan bagaimana cara agar masyarakat dapat memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan melalui keahlian atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat tersebut untuk meningkatkan produktivitas kerja dari masyarakat. Satuan ukur indeks pembangunan manusia adalah jiwa. Berikut data indeks pembangunan manusia dari tahun 2015-2020 di Indonesia.

Gambar 4.4 Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Dari Gambar 4.4 menunjukkan bahwa DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan tingkat ipm tertinggi di Indonesia di antara Provinsi-Provinsi lainnya yaitu sebanyak 80,77% pada tahun 2020. Sedangkan Provinsi dengan tingkat ipm terendah adalah Provinsi Papua yaitu sebanyak 60,44% pada tahun 2020. Rendahnya sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan manusia. Hal ini harus ditangani secepat mungkin karena akan menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan pada suatu daerah atau negara.

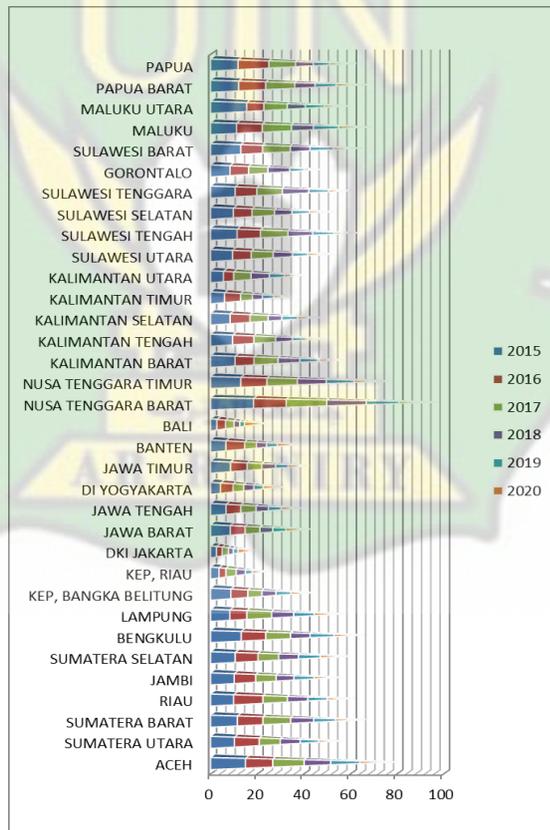
4.2.4 Pengangguran

Kemiskinan yang dialami oleh suatu daerah atau negara selalu berkaitan dengan pengangguran. Jumlah pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat hidup dalam kondisi miskin. Hal ini akan berpengaruh pada pembangunan suatu negara yang karena dapat menghambat kemajuan dalam perekonomian. Negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi maka akan mengalami angka kemiskinan yang tinggi pula, sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat dalam daerah atau negara tersebut tidak akan hidup makmur dan sejahtera.

Dari Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa persentase tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,83% dan menjadi Provinsi dengan jumlah pengangguran paling banyak di Indonesia berturut-turut dari tahun 2015-2020. Sedangkan Sedangkan Provinsi dengan jumlah

pengangguran yang paling rendah ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 6,43% pada tahun 2020 dan diikuti oleh Provinsi Kep. Riau sebanyak 5,75% dan Provinsi Bali yaitu sebanyak 8,62% pada tahun 2020 serta diikuti oleh Provinsi lain pada posisi selanjutnya. Kemiskinan memang lebih banyak dipengaruhi oleh minimnya sumber daya manusia, akan tetapi tingkat pengangguran juga sama berpengaruhnya terhadap kemiskinan.

Gambar 4.5 Persentase Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini pendekatan estimasi model analisis regresi data panel biasanya dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Ketiga jenis model ini diuji untuk penentuan model estimasi terbaik untuk digunakan.

4.3.1 Hasil Common Effect Model

Langkah pertama estimasi panel data adalah dengan menggunakan *common effect model*. Berikut merupakan hasil *common effect model* yang diolah menggunakan Eviews 12.

Tabel 4.1 Hasil Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Prob.
C	63.49039	0.0000
UMR	-4.10E-07	0.4562
IPM	-0.779537	0.0000
PG	0.349251	0.0034
R-square		0.466999
Adjusted R-squared		0.459004
F-statistic		58.41122
Prob(F-statistic)		0.000000
Durbin-Watson stat		0.060369

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

4.3.2 Hasil Fixed Effect Model

Langkah kedua estimasi panel data adalah dengan menggunakan *fixed effect model*. Berikut merupakan hasil *fixed effect model* yang diolah menggunakan Eviews 12.

Tabel 4.2 Hasil Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Prob.
C	44.00917	0.0000
UMR	-9.58E-08	0.6886
IPM	-0.472376	0.0000
PG	0.037750	0.2038
R-square		0.990707
Adjusted R-squared		0.988704
F-statistic		494.5655
Prob(F-statistic)		0.000000
Durbin-Watson stat		1.294804

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

4.3.3 Hasil Random Effect Model

Langkah terakhir estimasi panel data adalah dengan menggunakan *random effect model*. Berikut merupakan hasil *random effect model* yang diolah menggunakan Eviews 12.

Tabel 4.3 Hasil Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Prob.
C	48.77953	0.0000
UMR	6.53E-08	0.7695
IPM	-0.545629	0.0000
PG	0.038793	0.1893
R-square		0.422007
Adjusted R-squared		0.413337
F-statistic		48.67494
Prob(F-statistic)		0.000000
Durbin-Watson stat		1.117619

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

4.4 Hasil Uji Goodness of Fit

Pemilihan model dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan untuk pemilihan model yang tepat maka perlu melakukan metode-metode pengujian yang harus dilakukan yaitu

dengan melakukan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* sebagai berikut:

4.4.1 Hasil Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model yang akan digunakan apakah model *common effect* atau *fixed effect*. Dalam uji ini akan dibandingkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pemilihan model *common effect* atau pooled OLS jika probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 10%.

H_1 : Pemilihan model *fixed effect* jika probabilitas F statistiknya signifikan pada α 10%.

Dasar penolakan pada hipotesis tersebut adalah dengan perbandingan perhitungan F-statistiknya dengan F-tabel. Dalam perbandingan tersebut jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 dan diterima, begitupun sebaliknya. Berikut adalah hasil uji chow menggunakan program Eviews 12.

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	285.204.731	-33,167	0.0000
Cross-section Chi-square	826.059.078	33	0.0000

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hasil uji chow yang diperoleh nilai F-statistik atau Cross-section F yaitu 0,0000 atau lebih kecil daripada F-tabel nya, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya model *fixed effect* yang terpilih.

4.4.2 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik yang dilakukan dalam memilih apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang tepat untuk digunakan. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pemilihan model *random effect*, jika nilai chi-squarenya tidak signifikan pada α 10%.

H_1 : Pemilihan model *fixed effect* jika nilai chi-squarenya signifikan pada α 10%.

Berikut adalah hasil uji hausman menggunakan program Eviews 12.

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.206606	3	0.0656

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa hasil uji hausman yang diperoleh nilai F-statistik atau Cross-section random yaitu 0.0656 atau lebih kecil daripada F-tabel nya, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya model *fixed effect* yang terpilih.

4.5 Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil penentuan jenis model yang terbaik yang akan digunakan ialah *fixed effect model*. kesimpulannya ialah pengujian asumsi klasik harus dilakukan untuk memastikan hasil penelitian yang dilakukan valid dan sesuai dengan data yang

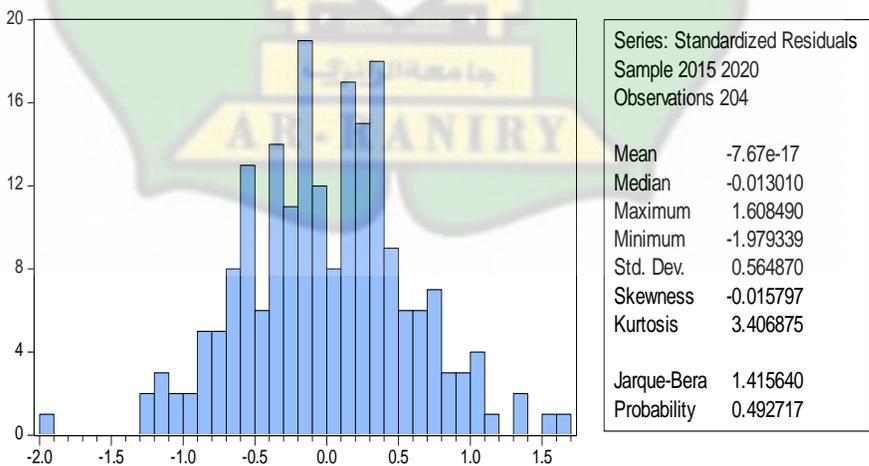
digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Karena metode estimasi data panel *common effect* dan *fixed effect* menggunakan *ordinary least square* (OLS) maka wajib melakukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2013) dalam (Febrina dan Yulianto, 2017).

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *histogram* yang dapat dilihat dari uji *Jaque-Bera*. Residualnya dapat dinyatakan normal apabila probabilitas dari uji *Jarque-Bera* lebih besar ($>$) daripada alpha 0,10 dan sebaliknya. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan program Eviews 12.

Berdasarkan Gambar 4.6 hasil uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa nilai *Jarque-Bera* lebih besar ($>$) daripada alpha 0,10 artinya residualnya berdistribusi normal.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas apabila nilai probabilitas $< (\alpha = 0.10)$ maka H_0 ditolak yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila nilai probabilitas $> (\alpha = 0.10)$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan program Eviews 12.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Prob.
C	1.090.372	0.0537
UMR	1.45E-08	0.7418
IPM	-0.009672	0.1905
PG	0.000208	0.9824

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel independen lebih besar atau $> (\alpha = 0.10)$ maka kesimpulannya ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang ada pada periode lain atau lebih tepatnya variabel gangguan tidak random. Nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Dubin Watson (dl dan du) adalah cara yang digunakan untuk mengetahui autokorelasi

(Gujarati, 2004) dalam (Yuliana dan Sitorus, 2018). Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan program Eviews 12.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	DI	Du	4-dl	4-du
12.948	12.393	11.843	27.607	28.157

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji autokorelasi nilai Durbin-Watson sebesar 1.2948 dan nilai dl sebesar 1.2707 artinya $dw > du$ dan $dw < 4-du$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.6 Pengujian Hipotesis

Uji yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini diantaranya uji Parsial, uji Simultan, serta uji Koefisien Determinasi. Pengujian hipotesis ini tujuannya untuk mengetahui berpengaruh atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen.

4.6.1 Uji Parsial

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial menggunakan Eviews 12.

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Prob.
C	4.400.917	0.0000
UMR	-9.58E-08	0.6886
IPM	-0.472376	0.0000
PG	0.037750	0.2038

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel upah minimum regional memiliki probabilitas sebesar 0.6886 atau lebih besar daripada 0.10 dengan nilai koefisien sebesar $-9.58E-08$ yang artinya upah minimum regional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian variabel indeks pembangunan manusia dengan probabilitas 0.0000 atau lebih kecil daripada 0,10 dengan nilai koefisien -0.472376 yang artinya indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya variabel pengangguran dengan probabilitas 0.2038 atau lebih besar daripada 0,10 dengan nilai koefisien 0.037750 artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pengangguran dengan kemiskinan.

4.6.2 Uji Simultan

Uji simultan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau hubungan variabel-variabel independen keseluruhan secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan. Berikut ini hasil uji parsial menggunakan Eviews 12.

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan

F-statistic	4.945.655
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada Prob(F-statistic) dalam model *fixed effect* ini memiliki nilai sebesar 0.00 dan lebih kecil daripada 0.10 yang artinya dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu upah minimum regional,

indeks pembangunan manusia, dan pengangguran memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan.

4.6.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan sebuah model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat). Nilai R^2 adalah satu, jika mendekati 0 maka dapat dikatakan bahwa kemampuan sebuah variabel menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas dan kecil. Sedangkan jika nilai sebuah variabel mendekati 1 maka variabel independen tersebut akan memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial menggunakan Eviews 12.

Tabel 4.11 Analisis Koefisien Determinasi

R-squared	0.990707
Adjusted R-square	0.988704

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020).

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa hasil koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan *fixed effect* adalah sebesar 0.990707 yang artinya besar kemampuan model ini dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 99,07 persen. Sisanya dipengaruhi oleh faktor diluar model regresi *fixed effect* sebesar 99,07 persen.

4.6.4 Analisis Regresi Data Panel

Model setimasi terbaik yang telah terpilih pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya akan dilakukan analisis *regresi linier* berganda. *Regresi linier* berganda adalah model hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan dilakukan *regresi linier* berganda adalah untuk hubungan antara masing-masing variabel baik itu hubungan positif ataupun negatif. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan sedangkan yang menjadi variabel independen adalah variabel upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran.

Persamaan linier berganda pada penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{KM} = 44.00917 + -9.58\text{E-}08 \text{ UMR} + -0.472376 \text{ IPM} + 0.037750 \text{ PG}$$

Berdasarkan nilai dari regresi linier berganda tersebut diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta pada penelitian ini adalah sebesar 44.00917, artinya jika variabel independen upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran dianggap tetap maka nilai variabel dependen atau kemiskinan adalah sebesar 44.00917.
- b. Nilai koefisien dari upah minimum regional adalah sebesar -9.5E-08. Artinya upah minimum regional tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Upah minimum regional

tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kemiskinan karena terdapat banyak faktor lain yang benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

- c. Nilai koefisien dari indeks pembangunan manusia adalah sebesar -0.472376 . Artinya terdapat pengaruh negatif antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan, apabila variabel lain diasumsikan tetap atau *Carteris Paribus*, kesimpulannya jika indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.472376 .
- d. Nilai koefisien dari pengangguran adalah sebesar 0.037750 . Artinya terdapat pengaruh antara pengangguran dengan kemiskinan, apabila variabel lain diasumsikan tetap atau *Carteris Paribus*, kesimpulannya jika pengangguran menurun sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.037750 .

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan *fixed effect model* didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Prob.
C	4.400.917	0.0000
UMR	-9.58E-08	0.6886
IPM	-0.472376	0.0000
PG	0.037750	0.2038

Sumber: Output Olah Data Eviews (2020)

Berdasarkan Tabel 4.11 persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{KM} = 44.00917 + -9.58\text{E}-08 \text{ UMR} + -0.472376 \text{ IPM} + 0.037750 \text{ PG}$$

Keterangan : KM = Kemiskinan

UMR = Upah Minimum Regional

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PG = Pengangguran

4.7.1 Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan *fixed effect model* diperoleh bahwa upah minimum regional dengan nilai probabilitas 0.6886 atau lebih besar dari alpha 0.10 (10%) dan nilai koefisien -9.58E-08. Secara parsial, tidak terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum regional dengan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020. Namun hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan rata-rata upah minimum regional sebagian provinsi di

Indonesia masih dalam kondisi stabil serta upah minimum regional tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kemiskinan karena terdapat banyak faktor lain yang benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki (2016) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2008-2013). Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan namun signifikan. Berbeda dengan penelitian ini upah minimum memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

4.7.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dengan nilai probabilitas 0.0000 atau lebih kecil ($<$) dari alpha 0.10 (10%) dan nilai koefisien -0.472376 artinya secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020. Secara simultan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat

kemiskinan sebesar 47%. Artinya Semakin meningkat kualitas sumber daya manusia maka akan semakin memperkecil angka kemiskinan di Indonesia. Peran pemerintah terutama dalam menyelenggarakan atau mewujudkan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dengan membangun sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan bidang pendidikan. Pemerintah harus mengutamakan kualitas pendidikan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pendidik, menyediakan alat dan kebutuhan untuk proses pembelajaran, melatih ketrampilan masyarakat agar kualitas sumber daya semakin meningkat serta akan berpeluang meningkatnya indeks pembangunan manusia dengan kemampuan bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan cara ini negara akan maju dan tumbuh dengan tingkat kemiskinan yang relatif kecil.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Dinata (2020), tentang pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Dinata, 2007).

4.7.3 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Variabel pengangguran dengan nilai probabilitasnya 0.2038 atau lebih besar ($>$) daripada alpha 0.10 (10%) dengan nilai koefisien 0.037750 artinya pengangguran secara parsial tidak

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 3,7%. Artinya pengangguran tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Namun secara simultan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Seperti yang kita ketahui penyebab yang paling umum banyaknya pengangguran di Indonesia adalah karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk menampungnya. Sehingga pengangguran semakin meningkat dan menjadi masalah dalam perekonomian serta pertumbuhan dalam suatu negara atau daerah karena produktivitas dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan munculnya masalah-masalah sosial lainnya.

Hal ini juga telah diteliti sebelumnya oleh Riana Puji Lestari (2017) tentang analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2011-2015, diperoleh hasil bahwa variabel pengangguran menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu kesimpulannya ialah ada banyak faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selain pengangguran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian tentang pengaruh upah minimum regional, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2020, maka penulis merangkum kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah minimum regional secara parsial memiliki probabilitas sebesar 0.6886 atau lebih besar daripada 0.10 (signifikan 10%) dengan nilai koefisien sebesar $-9.58E-08$ yang artinya upah minimum regional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020. Namun berdasarkan hasil penelitian secara simultan upah minimum regional berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020.
2. Indeks pembangunan manusia secara parsial memiliki probabilitas 0.0000 atau lebih kecil daripada 0,10 (signifikan 10%) dengan nilai koefisien -0.472376 yang artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020. Namun secara simultan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020.

3. Pengangguran secara parsial memiliki probabilitas 0.2038 atau lebih besar daripada 0,10 (signifikan 10%) dengan nilai koefisien 0.037750 artinya tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020. Namun secara simultan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan *fixed effect model* dengan nilai *R-square* sebesar 0.990707 yang artinya besar kemampuan model ini dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 99.07 persen. Sisanya dipengaruhi oleh faktor diluar model regresi *fixed effect* sebesar 0.93 persen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah harus menyalurkan pendapatan terutama upah minimum regional secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas atas hingga kelas bawah agar mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat bersama.

2. Masyarakat harus lebih mengutamakan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, serta perhatian dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan tujuannya agar indeks pembangunan manusia terus meningkat sehingga akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan.
3. Instansi perusahaan atau pemerintah yang mendiskriminasi perekrutan pegawai dan karyawan hendaknya dihilangkan serta benar-benar merekrut pegawai berdasarkan kemampuan bukan karena dasar kekerabatan, agama, suku/budaya dan lain-lain agar memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi wirausaha yang mandiri sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan dari hasil usaha tersebut dan masyarakat akan hidup lebih sejahtera dengan begitu tingkat kemiskinan akan semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, S., & Syechalad, M. N. (2016). Analisis Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(2), 545–554.
- Ahmad. (2020). Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*, 3(2), 177–192. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12272>
- Alfredo. (2018). Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 24–34.
- Ananda. (2012). Pengaruh Tingkat Upah Minimum Provinsi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Skripsi*.
- Atiyatna. (2016). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 8–21.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/je/article/viewfile/2592/2547%0a>
- Farathika. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.

- Hadiman, & Wira. (2018). Analisis Pengaruh Human Capital, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Regional (Umr) Terhadap Pengangguran Di Kota Makassar. *Skripsi*.
- Lestari. (2017). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Najmi. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia : Panel Data 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.30601/Humaniora.V3i1.239>
- Novianto, S. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*, 1–16.
- Panjawa, J., & Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 48–54. <https://doi.org/10.18196/Jesp.15.1.1283>
- Rosalia, I. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pengangguran Dan Zakat Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017. *Skripsi*.
- Safuridar. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 34–46.
- Said, N. R. (2017). Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kota Makassar. *Skripsi*.

- Shidiq. (2007). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018. *Tesis*.
- Shintia. (2001). Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh. *Skripsi*, 22, 164–182.
- Sinaga. (2003). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*, 1–12.
- Sukmaraga. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Pdrb Per Kapita , Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*.
- Wati. (2020). Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan). *Skripsi*, 1–95.
- Wulandari. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Proporsi Penduduk Miskin, Dan Indeks Gini Dengan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis*, 53(9), 1689–1699.
- Zulkifli. (2016). Pengaruh Upah Minimum Regional (Umr) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan. *Journal Ecces*, 3(2), 90–106.

Lampiran 1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	17,08	16,73	16,89	15,97	15,32	14,99
Sumatera Utara	10,53	10,35	10,22	9,22	8,83	8,75
Sumatera Barat	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
Riau	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82
Jambi	8,86	8,41	8,19	7,92	7,6	7,58
Sumatera Selatan	14,25	13,54	13,19	12,8	12,71	12,66
Bengkulu	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03
Lampung	14,35	14,29	13,69	13,14	12,62	12,34
Kep. Bangka Belitung	5,4	5,22	5,2	5,25	4,62	4,53
Kepulauan Riau	6,24	5,98	6,06	6,2	5,9	5,92
Dki Jakarta	3,93	3,75	3,77	3,57	3,47	4,53
Jawa Barat	9,53	8,95	8,71	7,45	6,91	7,88
Jawa Tengah	13,58	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41
D I Yogyakarta	14,91	13,34	13,02	12,13	11,7	12,28
Jawa Timur	12,34	12,05	11,77	10,98	10,37	11,09

Banten	5,9	5,42	5,45	5,24	5,09	5,92
Bali	4,74	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78
Nusa Tenggara Barat	17,1	16,48	16,07	14,75	14,56	13,97
Nusa Tenggara Timur	22,61	22,19	21,85	21,35	21,09	20,9
Kalimantan Barat	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49	7,17
Kalimantan Tengah	5,94	5,66	5,37	5,17	4,98	4,82
Kalimantan Selatan	4,99	4,85	4,73	4,54	4,55	4,38
Kalimantan Timur	6,23	6,11	6,19	6,03	5,94	6,1
Kalimantan Utara	6,24	6,23	7,22	7,09	6,63	6,8
Sulawesi Utara	8,65	8,34	8,1	7,8	7,66	7,62
Sulawesi Tengah	14,66	14,45	14,14	14,01	13,48	12,92
Sulawesi Selatan	9,39	9,4	9,38	9,06	8,69	8,72
Sulawesi Tenggara	12,9	12,88	12,81	11,63	11,24	11
Gorontalo	18,32	17,72	17,65	16,81	15,52	15,22
Sulawesi Barat	12,4	11,74	11,3	11,25	11,02	10,87
Maluku	19,51	19,18	18,45	18,12	17,69	17,44
Maluku Utara	6,84	6,33	6,35	6,64	6,77	6,78
Papua Barat	25,82	25,43	25,1	23,01	22,17	21,37
Papua	28,17	28,54	27,62	27,74	27,53	26,64

Lampiran 2 Tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2015-2020

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	Rp1.900.000	Rp2.118.500	Rp2.500.000	Rp2.717.750	Rp2.916.810	Rp3.165.031
Sumatera Utara	Rp1.625.000	Rp1.811.875	Rp1.961.354	Rp2.132.188	Rp2.303.403	Rp2.499.422
Sumatera Barat	Rp1.615.000	Rp1.800.725	Rp1.949.284	Rp2.119.067	Rp2.289.228	Rp2.484.041
Riau	Rp1.878.000	Rp2.095.000	Rp2.359.454	Rp2.464.154	Rp2.662.025	Rp2.903.144
Jambi	Rp1.710.000	Rp1.906.650	Rp2.063.000	Rp2.243.718	Rp2.423.889	Rp2.630.161
Sumatera Selatan	Rp1.974.346	Rp2.206.000	Rp2.388.000	Rp2.595.995	Rp2.804.453	Rp3.043.111
Bengkulu	Rp1.500.000	Rp1.605.000	Rp1.737.412	Rp1.888.741	Rp2.040.000	Rp2.213.604
Lampung	Rp1.581.000	Rp1.763.000	Rp1.908.447	Rp2.074.673	Rp2.240.646	Rp2.431.324
Kep. Bangka Belitung	Rp2.100.000	Rp2.341.500	Rp2.534.673	Rp2.755.443	Rp2.976.705	Rp3.230.022
Kep. Riau	Rp1.954.000	Rp2.178.710	Rp2.358.454	Rp2.563.875	Rp2.769.683	Rp3.005.383
Dki Jakarta	Rp2.700.000	Rp3.100.000	Rp1.931.180	Rp3.648.035	Rp3.940.973	Rp4.267.349
Jawa Barat	Rp1.000.000	Rp2.250.000	Rp1.420.624	Rp1.544.360	Rp1.668.372	Rp1.810.350
Jawa Tengah	Rp910.000	Rp910.000	Rp1.367.000	Rp1.486.065	Rp1.605.296	Rp1.742.015
Di Yogyakarta	Rp988.500	Rp988.500	Rp1.337.645	Rp1.454.154	Rp1.570.922	Rp2.004.000
Jawa Timur	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.388.000	Rp1.508.894	Rp1.605.396	Rp1.768.777
Banten	Rp1.600.000	Rp1.784.000	Rp1.931.180	Rp2.099.385	Rp2.267.965	Rp2.460.968

Bali	Rp1.621.172	Rp1.807.600	Rp1.956.727	Rp2.127.157	Rp2.297.967	Rp2.493.523
Nusa Tenggara Barat	Rp1.330.000	Rp1.482.950	Rp1.631.245	Rp1.825.000	Rp2.012.610	Rp2.183.883
Nusa Tenggara Timur	Rp1.250.000	Rp1.425.000	Rp1.525.000	Rp1.660.000	Rp1.793.293	Rp1.945.902
Kalimantan Barat	Rp1.560.000	Rp1.739.400	Rp1.882.900	Rp2.046.900	Rp2.211.500	Rp2.399.698
Kalimantan Tengah	Rp1.896.367	Rp2.057.558	Rp2.227.307	Rp2.421.305	Rp2.663.435	Rp2.903.144
Kalimantan Selatan	Rp1.870.000	Rp2.085.050	Rp2.258.000	Rp2.454.671	Rp2.651.781	Rp2.877.447
Kalimantan Timur	Rp2.026.126	Rp2.161.253	Rp2.354.800	Rp2.543.331	Rp2.747.561	Rp2.981.378
Kalimantan Utara	Rp2.026.126	Rp2.175.340	Rp2.358.800	Rp2.559.903	Rp2.765.463	Rp3.000.803
Sulawesi Utara	Rp2.150.000	Rp2.400.000	Rp2.598.000	Rp2.824.286	Rp3.051.076	Rp3.310.723
Sulawesi Tengah	Rp1.500.000	Rp1.670.000	Rp1.807.775	Rp1.965.232	Rp2.123.040	Rp2.303.710
Sulawesi Selatan	Rp2.000.000	Rp2.250.000	Rp2.435.625	Rp2.647.767	Rp2.860.382	Rp3.103.800
Sulawesi Tenggara	Rp1.652.000	Rp1.850.000	Rp2.002.625	Rp2.177.052	Rp2.351.870	Rp2.552.014
Gorontalo	Rp1.600.000	Rp1.875.000	Rp2.030.000	Rp2.206.813	Rp2.400.020	Rp2.586.900
Sulawesi Barat	Rp1.655.500	Rp1.864.000	Rp2.017.780	Rp2.193.530	Rp2.369.670	Rp2.571.328
Maluku	Rp1.650.000	Rp1.775.000	Rp1.925.000	Rp2.222.220	Rp2.400.664	Rp2.604.960
Maluku Utara	Rp1.577.617	Rp1.681.266	Rp1.975.000	Rp1.975.000	Rp2.508.092	Rp2.721.530
Papua Barat	Rp2.015.000	Rp2.237.000	Rp2.421.500	Rp2.667.000	Rp2.934.500	Rp3.134.600
Papua	Rp2.193.000	Rp2.435.000	Rp2.663.646	Rp2.895.650	Rp3.240.900	Rp3.516.700

Lampiran 3 Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2020

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Aceh	69,45	70	70,6	71,19	71,9	71,99				
Sumatera Utara	69,51	70	70,57	71,18	71,74	71,77				
Sumatera Barat	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38				
Riau	70,84	71,2	71,79	72,44	73	72,71				
Jambi	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29				
Sumatera Selatan	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01				
Bengkulu	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21	71,4				
Lampung	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69				
Kep. Bangka Belitung	69,05	69,55	69,99	70,67	71,3	71,47				
Kep. Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59				
Dki Jakarta	78,99	79,6	80,06	80,47	80,76	80,77				
Jawa Barat	69,5	70,05	70,69	71,3	72,03	72,09				
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87				
Di Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97				
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,5	71,71				
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45				
Bali	73,27	73,65	74,3	74,77	75,38	75,5				

Nusa Tenggara Barat	65,19	65,81	66,58	67,3	68,14	68,25
Nusa Tenggara Timur	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19
Kalimantan Barat	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66
Kalimantan Tengah	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05
Kalimantan Selatan	68,38	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91
Kalimantan Timur	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24
Kalimantan Utara	68,76	69,2	69,84	70,56	71,15	70,63
Sulawesi Utara	70,39	71,05	71,66	72,2	72,99	72,93
Sulawesi Tengah	66,76	67,47	68,11	68,88	69,5	69,55
Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,9	71,66	71,93
Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,2	71,45
Gorontalo	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49	68,68
Sulawesi Barat	62,96	63,6	64,3	65,1	65,73	66,11
Maluku	67,05	67,6	68,19	68,87	69,45	69,49
Maluku Utara	65,91	66,63	67,2	67,76	68,7	68,49
Papua Barat	61,73	62,21	62,99	63,74	64,7	65,09
Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44

Lampiran 4 Persentase Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2015-2020

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Aceh	14,87	11,57	13,29	11,3	12,38	16,18				
Sumatera Utara	10,13	10,47	8,9	8,42	7,68	10,43				
Sumatera Barat	11,41	10,78	11,77	9,74	9,2	12,93				
Riau	9,8	12,38	10,37	8,57	8,29	11,87				
Jambi	10,06	9,03	8,67	7,43	8,57	11,25				
Sumatera Selatan	10,44	9,66	8,73	8,33	9,22	12,98				
Bengkulu	13,01	10,37	10,47	8,32	10,12	13,09				
Lampung	8,18	7,18	10,49	9,3	8,66	13,18				
Kep. Bangka Belitung	8,55	7,14	5,9	5,92	6,25	9,11				
Kep. Riau	3,52	2,85	4,22	3,81	2,84	5,75				
Dki Jakarta	2,45	2,33	2,55	1,99	1,89	6,43				
Jawa Barat	8,32	6,18	6,28	5,39	5,52	10,31				
Jawa Tengah	6,52	6,2	6,38	5,19	5,36	8,6				
Di Yogyakarta	4,2	5,21	4,4	4,25	3,94	8,04				
Jawa Timur	8,41	7,01	6,14	5,79	5,23	8,99				
Banten	6,49	7,84	4,91	4,23	4,52	9,53				
Bali	2,64	3,6	3,48	2,36	1,93	8,62				

Nusa Tenggara Barat	18,32	13,87	17,27	16,82	13,97	16,83
Nusa Tenggara Timur	12,85	11,11	12,9	12,25	11,79	15,1
Kalimantan Barat	10,39	7,97	10,14	9,17	7,93	10,42
Kalimantan Tengah	9,33	8,95	9,15	7,14	6,05	8,04
Kalimantan Selatan	8,27	8,34	7,64	5,76	6,67	9,38
Kalimantan Timur	5,89	6,69	4,9	4,2	4,74	7,14
Kalimantan Utara	5,44	4,32	7,24	7,68	6,44	8,33
Sulawesi Utara	9,3	7,91	9,24	8,16	6,38	11,05
Sulawesi Tengah	11,25	9,88	11,64	10,4	9,1	10,53
Sulawesi Selatan	9,68	7,82	9,52	7,37	7,34	9,96
Sulawesi Tenggara	10,43	9,19	10,76	11,18	8,46	10,49
Gorontalo	8,23	7,83	8,13	9,15	6,16	7,68
Sulawesi Barat	12,81	9,27	11,71	8,36	9,91	11,98
Maluku	11,03	10,94	12,33	9,27	10,76	14,2
Maluku Utara	15,34	7,23	9,9	7,64	8,15	10,78
Papua Barat	11,96	11,46	12,27	8,57	8,9	13,18
Papua	11,68	13,07	11,25	7,51	7,03	11,26

Lampiran 5 Ouput Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/06/21 Time: 14:47

Sample: 2015 2020

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.49039	7.019979	9.044243	0.0000
X1	-4.10E-07	5.50E-07	-0.746516	0.4562
X2	-0.779537	0.092010	-8.472317	0.0000
X3	0.349251	0.117726	2.966628	0.0034
R-squared	0.466999	Mean dependent var		11.05392
Adjusted R-squared	0.459004	S.D. dependent var		5.859776
S.E. of regression	4.310009	Akaike info criterion		5.779170
Sum squared resid	3715.235	Schwarz criterion		5.844231
Log likelihood	-585.4753	Hannan-Quinn criter.		5.805489
F-statistic	58.41122	Durbin-Watson stat		0.060369
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6 Ouput Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/06/21 Time: 14:51
 Sample: 2015 2020
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.00917	5.802789	7.584141	0.0000
X1	-9.58E-08	2.39E-07	-0.401409	0.6886
X2	-0.472376	0.088153	-5.358622	0.0000
X3	0.037750	0.029591	1.275743	0.2038

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990707	Mean dependent var	11.05392
Adjusted R-squared	0.988704	S.D. dependent var	5.859776
S.E. of regression	0.622786	Akaike info criterion	2.053390
Sum squared resid	64.77295	Schwarz criterion	2.655206
Log likelihood	-172.4458	Hannan-Quinn criter.	2.296836
F-statistic	494.5655	Durbin-Watson stat	1.294804
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7 Ouput Hasil Uji Random Effect Model

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/06/21 Time: 15:01

Sample: 2015 2020

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.77953	5.349847	9.117929	0.0000
X1	6.53E-08	2.23E-07	0.293486	0.7695
X2	-0.545629	0.080307	-6.794299	0.0000
X3	0.038793	0.029455	1.317036	0.1893
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.427655	0.9806
Idiosyncratic random			0.622786	0.0194
Weighted Statistics				
R-squared	0.422007	Mean dependent var		0.633710
Adjusted R-squared	0.413337	S.D. dependent var		0.821607
S.E. of regression	0.629301	Sum squared resid		79.20398
F-statistic	48.67494	Durbin-Watson stat		1.117619
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.373550	Mean dependent var		11.05392
Sum squared resid	4366.610	Durbin-Watson stat		0.020272

Lampiran 8 Output Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	285.204731	(33,167)	0.0000
Cross-section Chi-square	826.059078	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/06/21 Time: 14:56

Sample: 2015 2020

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.49039	7.019979	9.044243	0.0000
X1	-4.10E-07	5.50E-07	-0.746516	0.4562
X2	-0.779537	0.092010	-8.472317	0.0000
X3	0.349251	0.117726	2.966628	0.0034
R-squared	0.466999	Mean dependent var		11.05392
Adjusted R-squared	0.459004	S.D. dependent var		5.859776
S.E. of regression	4.310009	Akaike info criterion		5.779170
Sum squared resid	3715.235	Schwarz criterion		5.844231
Log likelihood	-585.4753	Hannan-Quinn criter.		5.805489
F-statistic	58.41122	Durbin-Watson stat		0.060369
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9 Ouput Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.206606	3	0.0656

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0612
X2	-0.472376	-0.545629	0.001322	0.0439
X3	0.037750	0.038793	0.000008	0.7131

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/06/21 Time: 15:05

Sample: 2015 2020

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

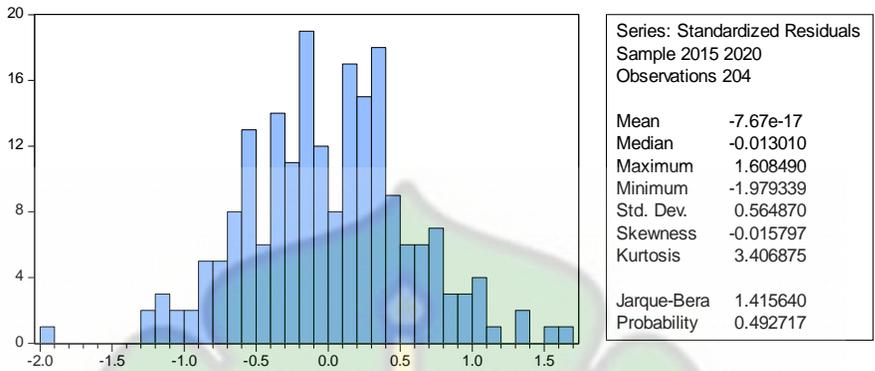
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.00917	5.802789	7.584141	0.0000
X1	-9.58E-08	2.39E-07	-0.401409	0.6886
X2	-0.472376	0.088153	-5.358622	0.0000
X3	0.037750	0.029591	1.275743	0.2038

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990707	Mean dependent var	11.05392
Adjusted R-squared	0.988704	S.D. dependent var	5.859776
S.E. of regression	0.622786	Akaike info criterion	2.053390
Sum squared resid	64.77295	Schwarz criterion	2.655206
Log likelihood	-172.4458	Hannan-Quinn criter.	2.296836
F-statistic	494.5655	Durbin-Watson stat	1.294804
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10 Output Uji Normalitas



Lampiran 11 Output Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 12/06/21 Time: 15:20

Sample: 2015 2020

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.090372	0.561761	1.940991	0.0537
X1	1.45E-08	4.40E-08	0.329863	0.7418
X2	-0.009672	0.007363	-1.313579	0.1905
X3	0.000208	0.009421	0.022060	0.9824
R-squared	0.013223	Mean dependent var		0.446462
Adjusted R-squared	-0.001579	S.D. dependent var		0.344628
S.E. of regression	0.344900	Akaike info criterion		0.728290
Sum squared resid	23.79124	Schwarz criterion		0.793352
Log likelihood	-70.28562	Hannan-Quinn criter.		0.754609
F-statistic	0.893323	Durbin-Watson stat		1.413114
Prob(F-statistic)	0.445554			

Lampiran 12 Output Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990707	Mean dependent var	11.05392
Adjusted R-squared	0.988704	S.D. dependent var	5.859776
S.E. of regression	0.622786	Akaike info criterion	2.053390
Sum squared resid	64.77295	Schwarz criterion	2.655206
Log likelihood	-172.4458	Hannan-Quinn criter.	2.296836
F-statistic	494.5655	Durbin-Watson stat	1.294804
Prob(F-statistic)	0.000000		

